

SKRIPSI

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIUTANG PADA
PT PLN ULP KARIANGO (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**SAFWA AL ZAFITRI
NIM: 18.2900.010**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIUTANG PADA
PT PLN ULP KARIANGO (ANALISIS MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**SAFWA AL ZAFITRI
NIM : 18.2900.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Manajemen Piutang pada PT
PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen
Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Safwa Al Zafitri

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3458/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710308 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT
ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan
Syariah)

Nama Mahasiswa : Safwa Al Zafitri

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.010

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No.B.3458/In 39.8/PP.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Ketua)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdahhah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nadra Mahruf, Ayahanda Ahmad Tera serta saudara-saudaraku tercinta Syahrul Maha Putra, dan Sheza Almyra berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag. M.A. Sebagai Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak Dr. Usman, M.Pd. Sebagai Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya

telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Dosen Pembimbing Utama dan Abdul Hamid, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., Selaku Penasehat Akademik Khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terima Kasih kepada Ibu Fahmi Arianti Selaku SPV Administrasi dan Pelayanan, Bapak Adit Selaku Staff Penjualan dan Ibu Masyita Operasional Catet Meter Selaku Karyawan di PT PLN ULP Kariango, yang telah membantu dalam memudahkan pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Kelompok KPM Kecamatan Lanrisang yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat desa dan membantu masyarakat.

12. Sahabat tercinta Narti yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport saya sejak di bangku SMP hingga menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.
13. Terima Kasih kepada sahabat Helmi Ahmad, Jumrianti, Hajrah Raisadah, Alma dan Ersya Pratiwi yang selalu mendukung saya selama mengerjakan skripsi.
14. Terima Kasih kepada Uni dan kedua orang tuanya telah mensupport dalam menyelesaikan skripsi.
15. Terima Kasih juga kepada Kakak tercinta Hartina Mahruf. S.Pd., atas bantuannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima Kasih kepada teman kos pondok indah Santi, Sinta, Rati dan Dilla yang menemani dari semester awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan.
17. Terima Kasih kepada teman seperjuangan Nurfitriya, Fitra anggraeni, Hurerah mahatva, Anugrah, Muhammad Fikri dan Jamaluddin dan seluruh teman-teman, kakak senior dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
18. Terima Kasih juga kepada diri sendiri yang telah sabar melewati semuanya sampai dengan detik ini. Semangat kamu hebat.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar

harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Amiin.

Parepare, 18 April 2022
17 Ramadhan 1443

Penulis,

SAFWA AL ZAFITRI
NIM. 18.2900.010



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Safwa Al Zafitri
Nim : 18.2900.010
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 2 Juli 1999
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 April 2022
Penyusun,

Safwa Al Zafitri
18.2900.010

ABSTRAK

Safwa Al Zafitri. *Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*. (Dibimbing oleh Ibu Damirah dan Bapak Abdul Hamid)

Setiap tahunnya dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan. Ketatnya persaingan membuat pemimpin perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan atau meningkatkan nilai/laba perusahaan, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sistem pengendalian piutang yang baik. PT PLN ULP Kariango adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang penjualan listrik, umumnya penjualan yang dilakukan sekarang secara kredit, hal ini memungkinkan terjadinya penunggakan piutang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana sistem pengendalian manajemen piutang yang terdapat di PT PLN ULP Kariango, dan untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen keuangan syariahnya terhadap sistem pengendalian manajemen piutang di PT PLN ULP Kariango.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai SPV administrasi dan pelayanan, bidang operasional, staf yang ada di PT PLN ULP Kariango dan pelanggan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pengendalian manajemen piutang PT PLN ULP Kariango menjalankan empat proses sistem pengendalian manajemen piutang untuk mencapai tujuan. Yaitu: penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran dan evaluasi dengan melihat volume penjualan, syarat pembayaran kredit dan penagihan terhadap piutang yang menunggak penerapannya berjalan dengan baik. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap sistem pengendalian manajemen piutang telah digunakan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah.

Kata kunci : Sistem pengendalian manajemen, Piutang, Manajemen keuangan syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined..ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Sistem.....	10
2. Pengendalian Manajemen	12
3. Piutang.....	18
4. Manajemen Keuangan Syariah	26
C. Tinjauan Konseptual	32

D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. TeknikPengumpulan dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Penyusunan Program di PT PLN ULP Kariango terhadap Analisis Manajemen Keuangan Syariah	47
B. Penyusunan Anggaran di PT PLN ULP Kariango terhadap Analisis Manajemen Keuangan Syariah	57
C. Pelaksanaan dan Pengukuran di PT PLN ULP Kariango terhadap Analisis Manajemen Keuangan Syariah	63
D. Pelaporan dan Analisis di PT PLN ULP Kariango terhadap Analisis Manajemen Keuangan Syariah	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA	
PENULIS.....	XXVIII

DAFTAR TABEL

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Laporan Data Penjualan Tahun 2021	52
4.2	Laporan Rincian Anggaran Tahun 2021	57
4.3	Laporan Data Kwh Pelanggan Tahun 2021	65



DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1	Instrumen Penelitian	VI
2	Data Mentah	VIII
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	X
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XI
5	Surat Izin Penelitian dari PT PLN ULP Kariango	XII
6	Surat Selesai Meneliti dari PT PLN ULP Kariango	XIII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIV
8	Dokumentasi	XXIV
9	Biodata Penulis	XXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahunnya dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan. Ketatnya persaingan membuat perusahaan atau pemimpin perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan atau meningkatkan nilai/laba perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus mengelola perusahaan dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan baik. Sistem pengendalian manajemen piutang yang baik membuat perusahaan dapat terus bertahan dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Untuk meningkatkan laba perusahaan, suatu perusahaan harus memiliki suatu strategi pemasaran. Salah satu startegi pemasaran yang digunakan ada penjualan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang kepada konsumen atau disebut piutang usaha.

Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam organisasi untuk menjalankan strategi organisasi. Pengendalian manajemen melibatkan berbagai aktivitas, yaitu merencanakan apa yang organisasi seharusnya lakukan, mengkoordinasikan berbagai aktivitas organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil, dan memengaruhi orang-orang yang ada dalam organisasi untuk mengubah perilaku mereka.¹

¹ Hery, "Pengendalian Akuntansi dan Manajemen", (Jakarta: Kencana, 2014),h.63.

Untuk menghindari peningkatan biaya yang terlalu besar akibat timbulnya piutang, maka perlu adanya pengelolaan piutang dengan mempertimbangkan yang mungkin timbul, karena pemberian kredit akan berakibat kemungkinan besar modal kerja tidak akan beroperasi secara efisien dan akan menimbulkan kesulitan keuangan dengan kata lain kesulitan likuiditas. Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.²

Pengendalian piutang merupakan suatu upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan efektifitas kegiatan atau operasional perusahaan. Dalam implementasinya, pengendalian piutang melibatkan semua pihak terutama dalam proses pencatatan piutang, dengan piutang yang maksimal diharapkan perusahaan dapat menjalankan fungsi-fungsi ekonomis seoptimal mungkin.³ Perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen piutang untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategis organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Piutang usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di sebelah kredit. Piutang usaha diklasifikasikan dalam neraca sebagai asset lancar.⁴

² Munawir, S, "Analisis Laporan Keuangan".edisi 4, (Yogyakarta: Liberty, 2007),h.47

³ Sodana, "Manajemen Keuangan, Teori dan Praktek", (Surabaya: Airlangga University Press, 2009),h.58

⁴ Hery, "Pengendalian Akutansi dan Manajemen", (Jakarta: Kencana, 2014),h.92.

Piutang pelanggan yang merupakan bagian dari aktiva lancar ini terkadang cukup besar jumlahnya, sehingga perlu dijaga keberadaanya dari resiko-resiko penyelewengan, penggelapan, dan berbagai praktek yang tidak sehat lainnya, serta dari kemungkinan tidak tertagih. Resiko-resiko yang berhubungan dengan piutang perusahaan tersebut merupakan masalah dalam pengelolaan perusahaan karena dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan sehingga jumlah kas yang masuk keperusahaan tidak optimal. Jumlah kas yang masuk tidak optimal dapat mempengaruhi performa perusahaan, baik dalam melakukan kegiatan produksi maupun kegiatan pengembangan perusahaan itu sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan piutang sehingga dapat meminimalkan terjadinya resiko-resiko penyelewengan, penggelapan, dan berbagai praktek yang tidak sehat lainnya serta dari kemungkinan tidak tertagih adalah dengan menerapkan pengendalian manajemen piutang perusahaan.⁵

Pengendalian piutang sangat mempengaruhi keuangan perusahaan dengan itu perlu adanya manajemen keuangan syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang terkandung didalamnya. Manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan afektivitas (hasil guna).

PT PLN ULP Kariango adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penjualan listrik. Umumnya penjualan yang dilakukan saat ini adalah

⁵ S. Nugroho Widjajanto, "Sistem Informasi Akuntansi", (Jakarta: Erlangga, 2001),h.62

penjualan kredit, dimana konsumen difasilitasi listrik terlebih dahulu dan pada akhir bulan dilakukan penagihan piutang. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan kredit, seperti yang terlihat dibawah ini:

Keterangan	2019		2020	
	Penjualan	Tunggakan Piutang	Penjualan	Tunggakan Piutang
Penjualan Listrik	40.834.940.948	3.728.283.372	57.400.180.440	8.299.053.593

Sumber : PT PLN ULP Kariango

Berdasarkan data penjualan dan tunggakan piutang diatas, diketahui bahwa penjualan listrik tahun 2019 sebesar Rp. 40.834.940.948 dengan jumlah tunggakan piutang sebesar Rp. 3.728.283.372. Dan tahun 2020 penjualan listriknya sebesar Rp. 57.400.180.440 dengan jumlah tunggakan piutang sebesar Rp. 8.299.053.593. Dengan besarnya jumlah tunggakan dari tahun ke tahun tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Sistem pengelolaan dan pengendalian piutang usaha yang baik sebagai upaya untuk lebih meningkatkan performansi/kinerja keuangan dengan menekan biaya-biaya terutama yang berkaitan langsung dengan pengendalian piutang usaha seperti syarat pembayaran kredit, penagihan piutang (yang bermasalah) dan penghapusan piutang usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan program di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah?
2. Bagaimana penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah?
3. Bagaimana pelaksanaan dan pengukuran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah?

4. Bagaimana pelaporan dan evaluasi di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyusunan program di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah
2. Untuk mengetahui penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah
4. Untuk mengetahui pelaporan dan evaluasi di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan syariah terkait dengan analisis sistem pengendalian manajemen piutang
 - b. Sebagai salah satu referensi atau bahan rujukan untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah serupa atau terkait dengan penelitian ini
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi instansi diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada pihak PT. PLN ULP Kariango dalam pengembangan analisis sistem pengendalian manajemen piutang

- b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian manajemen piutang dalam analisis manajemen keuangan syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengendalian manajemen dan piutang yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya dan perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dapat dilihat antara lain:

1. Nabila Habibie pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado”⁶. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern piutang usaha pada PT. Adira Finance Manado. Dalam penelitian ini menggunakan uji kualitatif terhadap pengendalian intern piutang usaha yang mengacu pada kerangka kerja COSO pada unsur-unsur pengendalian intern. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian intern piutang usaha efektif, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern. Adapun

Perbedaan penelitian Nabila Habibie dengan penelitian sekarang adalah terletak pada masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian Nabila Habibie meneliti tentang efektifitas pengendalian intern piutang usaha dengan menggunakan kerangka kerja model COSO yang di mana model Coso adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor. Sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang sistem pengendalian manajemen piutang.

⁶Nabila Habibie,”Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado”, (Jurnal Emba; Vol.1, No.3, 2013)

2. Vebi Puput Kurniawan pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik”⁷. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik, khususnya pada sistem pengendalian internal piutang usaha. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode analisis dan metode perancangan. Adapun metode analisis dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terdapat beberapa kelemahan, antara lain kelemahan sistem yang belum efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah adanya piutang usaha tak tertagih dan adanya rangkap fungsi yang berpotensi conflict of interest.

Perbedaan penelitian Vebi Puput Kurniawan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada permasalahan yang diteliti. Di mana pada penelitian Vebi Puput Kurniawan meneliti tentang sistem pengendalian internal. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang sistem pengendalian manajemen. Terdapat pula perbedaan jenis penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

3. Amalia Keumala Putri pada tahun 2012 yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Kaitannya Dengan Pengendalian Biaya Capital Expenditure (Studi kasus pada PT Pertamina Hulu Energi OFFshore North West Java)”⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen, pengendalian biaya *capital expenditure*, dan analisis sistem pengendalian manajemen dalam kaitannya dengan pengendalian

⁷Vebi Puput Kurniawan, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; Surabaya, 2013)

⁸Amalia Puput Putri, *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Kaitannya Dengan Pengendalian Biaya Capital Expenditure (Studi kasus pada PT Pertamina Hulu Energi OFFshore North West Java)*, (Skripsi Sarjana; Ekonomi; Bandung, 2012)

biaya *capital expenditure* pada PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen PT. Pertamina Hulu Energi ONWJ sangat memadai. Pengendalian biaya *capital expenditure* pada tahun 2008 pada perusahaan ini sangat tidak sesuai dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2008 pengendalian biaya *capital expenditure* sangat tidak sesuai adalah dikarenakan ada proyek yang ditunda ke tahun 2011 dan ada proyek yang dibatalkan. Seharusnya dengan telah diterapkannya sistem pengendalian manajemen pada perusahaan yang sangat memadai, maka pengendalian biaya *capital expenditure* tahun 2007 sampai 2009 yang dilihat dari selisih antara total anggaran dengan total aktual mengalami fluktuasi.

Perbedaan penelitian Amalia Keumala Putri dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada fokus penelitiannya, di mana penelitian terdahulu berkaitan dengan Biaya Capital Expenditure. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada piutang.

4. Anggraeny Retno Hayai pada tahun 2012 yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar”⁹. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan piutang dan sistem kontrol yang diterapkan oleh perusahaan, untuk menganalisis piutang kebijakan manajemen sehingga dapat mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Peti Kemas Makassar masih belum optimal dan efektif dalam pengelolaan dan pengendalian piutang, dilihat dari perhitungan ACP perusahaan yang hasilnya masih jauh dari standar yang ditetapkan saat ini sebagai perusahaan standar kredit.

⁹ Anggraeny Retno Hayai, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar” (Skripsi Sarjana; Ekonomi; Makassar, 2012)

Perbedaan dari penelitian Anggraeny Retno Hayai dengan penelitian sekarang adalah masalah yang diteliti. Di mana pada penelitian terdahulu mengangkat masalah tentang Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang. Sedangkan penelitian sekarang mengangkat masalah tentang Analisis Sistem Pengendalian Manajemen Piutang. Terdapat pula perbedaan pada jenis penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan 2 jenis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian sekarang hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grandteori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Sistem

Secara umum sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.¹⁰

Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Sebuah organisasi dan sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang manajer yang mengorganisasikan pekerjaan unitnya adalah orang yang menciptakan sesuatu sistem pengembangan personal *computer* (PC) menciptakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras dan lunak PC ini menjadi subsistem dari suatu perangkat konferensi elektronik. Sistem fisik dan sosial adalah sistem yang abstrak (*abstract system*) dari konsep dan ide.¹¹

¹⁰ Sutarman, "Pengantar Teknologi Informasi" Edisi 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),h.5.

¹¹ Jaluanto Sunu Punjul Tyoso, "Sistem Informasi Manajemen" Ed1,Cet 1, (Yogyakarta: Depublish, 2016),h.2.

Menurut Atin Hafidiah, Dan Dusa Sumartaya, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik. Sistem fisik ini mampu dideskripsikan dalam bentuk perwujudan benda yang berbentuk fisik.

- b. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia

Sistem alamiah adalah sistem yang berhubungan dengan sifat yang terjadi dengan sendirinya tanpa manusia bias turut campur dalam mengendalikan alurnya. Sistem buatan ini lebih kepada sistem yang memudahkan manusia untuk bekerja dan berkreasi semaksimal mungkin dengan efisiensi waktu, tenaga, dan pikiran.

- c. Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem yang memungkinkan (*probabilistic system*)

Sistem tertentu (*deterministic system*) adalah sistem berdasarkan program-program yang dijalankan menghasilkan output yang dapat dipastikan. Sedangkan sistem yang *probabilistic* adalah sistem yang output yang dihasilkan tidak dapat diprediksi dengan kepastian yang tinggi.

- d. Sistem sederhana, kompleks dan sangat kompleks

Klasifikasi ini didasarkan atas banyaknya sub sistem dan hubungan yang terjadi antara sub sistem yang ada pada sistem sederhana memiliki sub sistem yang sedikit dengan hubungan yang sedikit atau sederhana. Sedangkan sistem yang kompleks memiliki sub sistem dan hubungan yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem sederhana, demikian juga sistem yang sangat kompleks memiliki sub sistem dan hubungan yang lebih banyak daripada sub sistem kompleks hubungan antara tingkat determinasi dan kompleksitas sistem.

e. Sistem terbuka dan sistem tertutup

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan dengan pihak luarnya. Sistem tertutup demikian pada akhirnya akan menjadi tidak teratur.¹²

2. Pengendalian Manajemen

Pengendalian Manajemen (*Management Control*) adalah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar performa dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan performa aktual dengan standar-standar yang ditentukan dimuka tersebut, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan atau deviasi dan untuk mengukur besarnya deviasi tersebut, dan mengambil setiap tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara efektif dan efisien mungkin, dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu alasan pengendalian dibutuhkan adalah untuk memonitor kemajuan dan mengoreksi kesalahan.¹³

Seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan. Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:¹⁴

- a. Pengawasan langsung, merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab setiap pemimpin pada tingkat manapun. Pengawasan langsung adalah suatu sistem pengawasan yang menuntut kebersamaan yang

¹² Iputu Hardani Hesti Duari, "Sistem Informasi Manajemen Pemanduan Wisata", (Yogyakarta;Depublish, 2017), h.67.

¹³ Amin, "Manajemen Suatu Pengantar", (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h.344.

¹⁴ Kasmir, "Pengantar Manajemen Keuangan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),h.245.

aktif antara atasan dan bawahan, dari setiap karyawan atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan dan konditue setiap individu dengan penilain yang lebih objektif.¹⁵

- b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan dari jarak jauh mengenai laporan yang disampaikan oleh bawahan atau laporan ini berbentuk laporan tertulis dan laporan secara lisan. Pengawasan yang efektif membantu manajer dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengewaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai.

Sistem pengendalian manajemen adalah serangkain teknik terintegrasi untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi demi membuat keputusan perencanaan serta pengendalian, untuk memotivasi perilaku karyawan, dan untuk mengevaluasi kinerja. Sistem perencanaan manajemen yang dirancang dengan baik akan mendukung dan mengkoordinasikan proses pengambilan keputusan serta memotivasi individu diseluruh organisasi agar bertindak selaras.¹⁶

Menurut Merchant dan Steede menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola sesuai dengan tujuan organisasi. Fokus dari konsep ini adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia sehingga kepentingan individu selaras dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya Control system merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap organisasi apabila organisasi tersebut berencana mencapai tujuan tujuannya.¹⁷

¹⁵ Mamduh M. Hanafi, "Manajemen Keuangan", (Yogyakarta: YKPN, 1998),H.87

¹⁶Charles dkk, "Pengantar Akuntansi Manajemen", (Jakarta: Erlangga, 2014),h.373

¹⁷ Wirawan Ed Rianto, "Strategi Dalam Konteks Pengendalian Manajemen", (Surabaya: Universitas Ciputra,2019),h.6

Menurut Supriyono sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Proses sistem pengendalian manajemen melibatkan komunikasi dan interaksi formal mencakup empat tahapan, penyusunan program (pemrograman), penyusunan anggaran (penganggaran), pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis (evaluasi).¹⁸

Adapun proses dalam sistem pengendalian manajemen sebagai berikut:¹⁹

- 1) Penyusunan program (pemrograman), adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program utama yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk mengimplementasikan strategi-strategi dan penaksiran jumlah sumber-sumber yang akan digunakan untuk setiap program. Perencanaan strategis meliputi tiga kegiatan pokok yang dapat dipisahkan namun saling berhubungan. Ketiga macam kegiatan pokok tersebut adalah:
 - a) Analisis usulan program baru, usulan program baru dapat bersifat reaktif atau proaktif. Usulan program reaktif adalah usulan program baru sebagai reaksi atas tantangan yang dihadapi perusahaan. Usulan program proaktif adalah usulan program yang timbul karena perusahaan tersebut secara aktif berinisiatif merancang kesempatan-kesempatan baru.
 - b) Penelaahan program yang sedang berjalan, adalah penelaahan secara bersinambung dan sistematis terhadap program yang ada untuk menjamin

¹⁸ Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi 1, buku 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.42

¹⁹ Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi 1, buku 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.43-44

bahwa kondisi-kondisi lingkungan luar yang baru telah diperkirakan dan tindakan yang tepat terhadap kondisi tersebut telah diputuskan.

- c) Sistem program formal, adalah proses untuk memproyeksikan konsekuensi keuangan (pendapatan, biaya, laba, investasi) dan konsekuensi lainnya untuk beberapa periode (jangka panjang) dimasa yang akan datang.²⁰
- 2) Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses pembuatan keputusan mengenai peran para manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan program atau bagian program. Anggaran adalah rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran-ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter, mengenai perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi beserta pusat-pusat pertanggungjawabannya untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pengendalian melalui anggaran adalah proses kegiatan dengan menggunakan anggaran. Karakteristik anggaran adalah:
 - a) Anggaran mengestimasi potensi laba unit bisnis
 - b) Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter dan didukung oleh ukuran-ukuran nonmoneter
 - c) Anggaran biasanya mencakup periode satu tahun
 - d) Anggaran merupakan komitmen manajemen untuk menerima tanggungjawab mencapai tujuan yang dianggarkan
 - e) Usulan anggaran dikaji ulang dan disahkan oleh manajer dengan wewenang yang lebih tinggi dari pengusul anggaran²¹

²⁰ Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi 1, buku 2 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.7-18

²¹ Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi 1, buku 2 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.40

- 3) Pelaksanaan dan pengukuran. Untuk pelaksanaan anggaran diperlukan pengendalian manajemen operasi. Pengendalian manajemen operasi adalah meliputi metode, prosedur, dan cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan para anggota organisasinya dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pelaksanaan aktivitas secara efisien dan efektif berarti bahwa para pelaksana hanya melaksanakan aktivitas yang bernilai tambah secara efisien.
- 4) Pelaporan dan analisis (evaluasi). Laporan memuat informasi apa yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan anggarannya atau programnya. Pelaporan adalah proses untuk menyusun dan menyajikan laporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan disusun setiap pusat pertanggungjawaban dan program laporan pusat pertanggungjawaban menunjukkan informasi sesungguhnya dibandingkan dengan anggarannya, dalam ukuran-ukuran kinerja keuangan maupun nonkeuangan, serta informasi internal maupun eksternal. Analisis adalah proses untuk mengetahui penyebab perbedaan antara informasi sesungguhnya dengan anggarannya atau yang diharapkan dalam rangka menilai kinerja manajemen. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
 - a) Identifikasi, dalam tahap ini manajer atasan menafsirkan selisih yang timbul dan kondisi dalam pusat pertanggungjawaban yang diukur selisihnya. Oleh karena itu, manajer pusat pertanggungjawaban harus segera memberikan informasi penting pada atasannya mengenai peristiwa yang segera memerlukan tindakan koreksi.
 - b) Penyelidikan, dengan menggunakan cara atau teknik tertentu manajer atasan melakukan penyelidikan terhadap selisih yang timbul. Teknik penyelidikan yang

dapat digunakan misalnya, pertimbangan manajemen, nilai yang diharapkan dan pengendalian kualitas secara statistik.

- c) Tindakan, dengan apa yang didasarkan atas hasil penyelidikan, manajer pusat pertanggungjawaban dapat dimotivasi untuk memutuskan tindakan yang diperlukan. Atasan dan manajer pusat pertanggungjawaban harus sepakat mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dihadapi. Tindakan ini perlu menekankan pada kinerja jangka panjang dan jangka pendek.²²

Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal yang pendelegasian otoritasnya jelas terstruktur dan prosedurnya harus diikuti oleh karyawan perusahaan. Selain dari proses sistem pengendalian manajemen, perlu juga adanya suatu struktur yang dipakai untuk membantu agar tujuan dapat berjalan dengan baik. Struktur sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi fungsional, yaitu struktur organisasi yang sering digunakan sebagai pembagian kerja dalam bentuk berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dalam struktur organisasi ini sangat cocok diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya, menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan.
- 2) Struktur organisasi divisional, yaitu struktur yang dikelompokkan atau dibagi berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar dan letak geografis, bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang bertingkat menengah keatas.

²² Supriyono, "Sistem Pengendalian Manajemen", Edisi 1, buku 2 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.141-142

3) Struktur organisasi matrik, yakni susunan organisasi yang mengkaitkan garis wewenang antara vertikal dan horizontal. Struktur ini terjadi jika pembentukan departemen produk ditimpahkan pada organisasi yang membentuk departemennya dilakukan secara fungsional. Perusahaan diorganisasikan sebaik mungkin oleh sebuah struktural fungsional. Lalu di bentuk departemen kecil, untuk dipekerjakan pada proyek penting tertentu.²³

Sistem pengendalian manajemen pada dasarnya suatu sistem yang digunakan oleh manajemen untuk membangun masa depan organisasi, untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Tujuan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah memotivasi karyawan agar bekerja demi kepentingan terbaik organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan memperkuat baik kesesuaian tujuan maupun upaya manajerial.²⁴

3. Teori Piutang

Menurut Niswonger, C, Rollin. Warren, Carl, S. Reeves, James, M. Fess, Phillip, E. Menyatakan bahwa piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum adalah ialah penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang biasanya timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa, pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atau saham dan surat berharga lain yang akan diterbitkan, klaim atas ganti rugi dari perusahaan asuransi, dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain.²⁵

²³ Murhaban Dan Adnan, "Sistem Pengendalian Manajemen", (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2020), h.10-11.

²⁴ Charles dkk, "Pengantar Akuntansi Manajemen", (Jakarta: Erlangga, 2014), h.375.

²⁵ Niswonger dkk, "Prinsip-prinsip Akuntansi", (Jakarta: Erlangga, 1999), h.324.

Piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dimana pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, namun bersifat bertahap. Penjualan piutang artinya lebih jauh perusahaan menerapkan manajemen kredit. Dan salah satu target dari manajemen kredit adalah tercapainya target penjualan sesuai dengan perencanaan, serta selanjutnya menunggu masuknya dana angsuran ke kas perusahaan. Piutang adalah klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang usaha pada umumnya adalah kategori yang paling signifikan dari piutang dan merupakan hasil dari aktivitas normal perusahaan atau entitas, yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Piutang usaha dapat diperkuat dengan janji pembayaran tertulis secara formal dan diklasifikasikan sebagai wesel tagih (notes receivable). Piutang usaha umumnya merupakan jumlah yang material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non usaha.²⁶

Piutang merupakan harta perusahaan yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, Syamsudin dan Fahmi mendefinisikan, piutang merupakan bentuk penjualan yang dilakukan secara tunai, namun bertahap.²⁷

Definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain karena adanya penjualan dalam bentuk jasa (usaha) atau barang yang timbul melalui penjualan dilakukan secara kredit oleh perusahaan dan akan dilakukan penagihandi masa yang

²⁶ Lukman Syamsuddin, "Manajemen Keuangan Perusahaan", (Jakarta: Rajawali Press, 2011),h.122

²⁷Iwan Setiawan, "Akuntansi keuangan Menengah", (Bandung: Refika Utama, 2010),h.68

akan datang. Diluar dari itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang.

Menurut Bambang Riyanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya piutang adalah:²⁸

1) Volume penjualan kredit

Besar kecilnya volume penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan mempengaruhi jumlah piutang perusahaan mempengaruhi jumlah piutang perusahaan. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar pula investasi dalam piutang perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil volume penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan, semakin kecil jumlah piutangnya.

2) Syarat pembayaran kredit

Syarat atas penjualan kredit yang ditetapkan pihak perusahaan dapat bersifat ketat atau lunak. Semakin ketat syarat pembayaran yang ditetapkan, semakin cepat pengembalian piutang sehingga jumlah piutang perusahaan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin lunak syarat pembayaran yang ditetapkan, semakin lama pengembalian piutang dan jumlah piutang akan lebih besar.

3) Ketentuan tentang pembatasan pembeli

Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas pemberian kredit kepada pelanggan. Semakin tinggi batas yang ditetapkan, semakin besar pelanggan membeli secara kredit sehingga jumlah piutang akan lebih besar.

4) Kebijakan dalam penagihan piutang

²⁸ Bambang Riyanto, "Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan", Edisi 4, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada), h.87

Kebijakan penagihan piutang secara aktif atau pasif, dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga berharap agar pelanggan menyetor pembayaran utang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara memungut secara langsung atau memberi peringatan dengan mengirim surat kepada pelanggan.

5) Kebiasaan pembayaran dari pelanggan

Sebagai pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan cash discount atau sesudahnya mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang, sebab diskon priode mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih untuk terealisasi menjadi kas.²⁹

Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan tuntutan pada pihak perusahaan ke pada pelanggan telah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan demi kemajuan perusahaan. Berikut ciri-ciri untuk menganalisis lamanya tanggungan utang yang harus dibayar sebelum waktu yang disepakati, yaitu:³⁰

- 1) Memiliki nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah istilah yang menjelaskan jumlah (nominal) dari nilai transaksi yang ditambah dengan presentase (nilai) bunga yang dibebankan untuk dibayar pada tanggal jatuh tempo. Bunga adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pengutang karena adanya penangguhan waktu pembayaran utang tersebut. Sedangkan bagi pemberi piutang, bunga adalah tambahan pendapatan yang berasal dari pembayaran penjualan.

²⁹Bambang Riyanto, "Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan", Edisi 4, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada), h.88-89

³⁰Harjito, Martono, "Manajemen Keuangan", Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013), h.51

- 2) Memiliki tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo didapatkan dari waktu atau usia piutang. Pada umumnya, penjual memakai dua jenis pengukuran dalam surat promes jatuh tempo, yaitu bulan dan hari. Jika suatu promes berumur bulanan, tanggal jatuh temponya berarti sama dengan tanggal pembelian pada saat pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Jika promes berumur harian harus dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh tempo atau waktu pelunasan secara pasti.
3. Menerapkan bunga yang berlaku, piutang dapat terjadi karena konsumen/pelanggan melakukan transaksi secara kredit atau terlambatnya melakukan pembayaran sehingga menimbulkan bunga. Bunga ini harus dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi telah meminta jangka waktu pembyaran tertentu.

Klasifikasi adalah pengaturan sistematis dalam pembagian atau pengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Menurut Zaki Badriwa menjelaskan dalam piutang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:³¹

- 1) Piutang usaha (*Account Receivable*), piutang yang timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan. Transaksi paling umum yang menciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan memberikan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relative pendek, seperti 30-60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan dineraca sebagai aktiva lancar. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih, dilaporkan dalam

³¹ Zaki Badriwa, "Intermedite Accounting", (Yogyakarta:BPFE,2000),h.124

neraca ini harus benar-benar menunjukkan jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih, setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat dalam pembukuan sebagai beban operasional.³² Dalam piutang usaha yang tidak dapat ditagih terdapat metode penghapusan yang digunakan untuk meminimalisir kerugian usaha yaitu:

- a) Metode penghapusan langsung (*direct Write Off method*) merupakan metode akuntansi untuk piutang dagang, dimana perusahaan menunggu hingga departemen kreditnya memutuskan bahwa akun piutang seorang pelanggan sudah tidak tertagih, kemudian mendebit beban piutang tak tertagih dan kredit piutang dagang pelanggan.
 - b) Metode penyisihan (*Allowance Method*) merupakan metode pencatatan kerugian dengan dasar perkiraan, bukannya menunggu pelanggan mana yang tidak akan melunasi ke perusahaan.³³
- 2) Piutang wesel (*Notes Receivable*), adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan disaat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Sepanjang wessel tagih diperkirakan tertagih setahun, maka biasanya digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka digunakan untuk mengolah data transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

³²Hery, "Pengendalian Akuntansi dan Manajemen", (Jakarta: Kencana, 2014),h.68.

³³Horngran, dkk, "Akuntansi", (Jakarta: Erlangga, 2006),h.92

Utang-piutang wesel dapat berasal dari transaksi jual-beli kredit dan penggantian status utang-piutang terbuka (tanpa wesel). Bagi perusahaan perbankan atau lembaga keuangan, piutang wesel berasal dari penarikan pinjaman oleh nasabah. Wesel dibedakan menjadi wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Nilai jatuh tempo wesel tanpa bunga adalah sebesar nilai nominalnya, sedangkan nilai jatuh tempo wesel berbunga adalah nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu wesel.³⁴

Perputaran piutang usaha (*account receivable turnover*) adalah penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Hal ini mengukur seberapa sering piutang usaha dikonversi menjadi kas selama suatu periode. Sedangkan jumlah hari penjualan dalam piutang adalah saldo piutang usaha akhir dibagi dengan penjualan kredit rata-rata harian. Hal ini mengukur lamanya waktu piutang usaha beredar.³⁵

Darsono dan Ashari mendefinisikan perputaran piutang adalah seberapa kali saldo rata-rata piutang dikonvensikan ke dalam kas selama periode tertentu. Untuk menghitung perputaran piutang dapat digunakan rumus:³⁶

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang Rata-Rata}}$$

Rasio perputaran piutang merupakan perbandingan antara penjualan dengan piutang rata-rata selama satu periode tertentu. Periode yang dimaksud biasanya untuk satu tahun, namun untuk kepentingan analisis dapat digunakan satuan waktu berdasarkan kuartalan, bulanan, dan seterusnya. Semakin tinggi rasio perputaran piutang, berarti menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah.

³⁴ Slamet Sugiri, "Akuntansi Pengantar 2", (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2005),h.27.

³⁵ Elvy Maria Manurung, "Akuntansi Dasar (Untuk Pemua)", (Jakarta: Erlangga, 2011),h.73.

³⁶ Darsono dan Ashari, "Manajemen Keuangan", (Yogyakarta:BPFE,2004),H.59.

Dan sebaliknya jika rasio perputaran piutang semakin rendah berarti ada *over investment* dalam piutang.³⁷

Penagihan piutang adalah tagihan kepada pihak luar yang dapat ditagih oleh seseorang akibat adanya penjualan atau penyerahan barang atau jasa secara kredit, yang diharapkan akan melunasi sesuai dengan periode yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸ Untuk menjalankan penagihan perlu adanya suatu pengawasan dari atasan dalam mengendalikan prosedur penagihan dapat berjalan lancar.

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada atau banyak kendala yang timbul karena belum tentu debitur membayar tagihannya.³⁹

Prosedur penagihan piutang yang dikemukakan dari penulis Kasmir antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Menegur via telepon kepada pelanggan yang belum membayar pada satu hari setelah batas akhir penagihan.
- 2) Menegur via surat kepada pelanggan yang belum membayar sesudah tujuh hari dari batas akhir penagihan.
- 3) Menyerahkan urusan penagihan kepada penagihan utang dari luar perusahaan bagi pelanggan yang belum membayar pada satu bulan setelah batas akhir penagihan.

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat

³⁷Mistianah, "Laporan Manajemen dan Keuangan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),h.72

³⁸Al Hanafi Yusuf, "Dasar-dasar Akuntansi", (Yogyakarta: YKPN, 1992),H.89

³⁹Mulyadi, "Sistem Akuntansi", (Jakarta: Salemba Empat, 2008),h.51

⁴⁰ Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan", (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2012),h.293.

membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.⁴¹ Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang yaitu: Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴²

Allah memerintahkan manusia agar saling tolong-menolong sesama manusia, hal ini dikarenakan manusia tidak bias akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam konsep Islam utang-piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong) dengan demikian utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

4. Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh

⁴¹Abdul Aziz, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", (Jurnal Bisnis; Vol.4, No. 1, 2016)

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, QS Al-Maidah/5:2 (Jakarta Timur, 2015), h.106

dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan afektivitas (hasil guna).⁴³

Berdasarkan dari uraian-uraian di atas, secara implisit dapat diketahui bahwa hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan) agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.⁴⁴

Menurut Didin dan Hendri, Manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:⁴⁵

- 1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
- 2) Mementingkan adanya struktur organisasi
- 3) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan control, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.

Konteks Islam, fungsi manajemen syariah memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai falsafah hidup manusia.⁴⁶

⁴³Najmudin, "Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern", (Yogyakarta: Andi, 2011), h.39.

⁴⁴Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Yogyakarta; Ekonisia, 2004), h.58.

⁴⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, "Manajemen Syariah dalam Praktik", (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), h.79.

⁴⁶Sadono Sukirno, "Pengantar Bisnis", (Jakarta; Kencana, 2006), h.173.

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategi dapat membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk:

- a) Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang
- b) Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai
- c) Menentukan dan yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.⁴⁷

Perencanaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan mendatangkan kemaslahatan (keselamatan), baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang diatur di dalam Al-Quran Surah Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka yang tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.⁴⁸

⁴⁷Muhammad Ismail Yusanto dkk, "Pengantar Manajemen Syariah", (Jakarta; Khairul Bayan, 2002),h.83.

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya, Al-Furqon:67*(Jakarta Timur, 2015), h.365

Allah menyuruh setiap umatnya didalam perencanaan sesuatu dilakukan harus mengeluarkan sebagian yang mereka punya dan hasil yang diperoleh, agar apa yang ricanakan berjalan dan terarah sesuai hasil yang ingin dicapai.

2) Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah urgent, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi.

3) Fungsi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian kepemimpinan, yaitu umara yang disebut juga dengan ulul amri. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Pemimpin disebut khadimul ummah yang berarti pelayan umat. Menurut istilah, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayan masyarakat.

4) Fungsi Pengawasan

Falsafah fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab Individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Menurut Husen Sobana kerangka dasar sistem keuangan Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara Bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta

tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan Syariah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Larangan Bunga, yang dalam istilah secara harfiah berarti “kelebihan” dan ditafsirkan sebagai “peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan” adalah ajaran pokok dari sistem keuangan Syariah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa mempedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.
- 2) Uang sebagai modal potensial, uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya Ketika uang tersebut hanya sebagai modal, bukan modal potensial.
- 3) Berbagi resiko, karena adanya larangan bunga penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyediaan modal keuangan dan pengusaha berbagai resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian resiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.
- 4) Larangan perilaku spekulatif, sistem keuangan Syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian dan resiko.
- 5) Kesucian kontrak, artinya islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

⁴⁹ Dadan Husen Sobana, “Manajemen Keuangan Syariah”, Cet 1, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017),h.22.

- 6) Aktivitas sesuai syariat, hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.
- 7) Keadilan sosial, pada prinsipnya setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

Manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya

a) Aktivitas perolehan dana

Setiap upaya dalam memperoleh dana semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariaah, seperti mudharabah, musyrakah, murabahah, istishna, ijarah, salam dan wadiah. Terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi ijarah. Sedangkan, mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan di bagi bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

b) Aktivitas perolehan aktivitas

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

c) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diratifikasi dengan pasar modal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diautur oleh DSN-MUI.⁵⁰

C. Tinjauan Konseptual

1. Sistem pengendalian

Menurut Supriyono sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi para anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Proses sistem pengendalian manajemen melibatkan komunikasi dan interaksi formal mencakup empat tahapan, penyusunan program (pemrograman), penyusunan anggaran (penganggaran), pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis (evaluasi).⁵¹

2. Piutang

Menurut Niswonger, C, Rollin. Warren, Carl, S. Reeves, James, M. Fess, Phillip, E. Menyatakan bahwa piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, dimana yang paling umum adalah ialah

⁵⁰ Boedi Abdullah, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, (2017), h. 26-28

⁵¹ Supriyono, “Sistem Pengendalian Manajemen”, Edisi 1, buku 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.42

penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang biasanya timbul sebagai akibat dari transaksi-transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa, pemberian pinjaman, pesanan-pesanan yang diterima atau saham dan surat berharga lain yang akan diterbitkan, klaim atas ganti rugi dari perusahaan asuransi, dan sewa atas aktiva yang dioperasikan oleh pihak lain.⁵²

3. Manajemen Keuangan Syariah

Menurut Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efesiensi (daya guna) dan afektivitas (hasil guna).⁵³

Berdasarkan pada penelitian diatas maka yang dimaksud pada judul ini adalah tentang sistem pengendalian manajemen piutang yang terdapat di PT PLN ULP kariango dengan melihat bagaimana pengelolaan manajemen piutangnya serta penagihan yang dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah. Maka penulis berfokus pada judul “Sistem pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”.

⁵² Niswonger dkk, “Prinsip-prinsip Akuntansi”, (Jakarta: Erlangga, 1999), h.324.

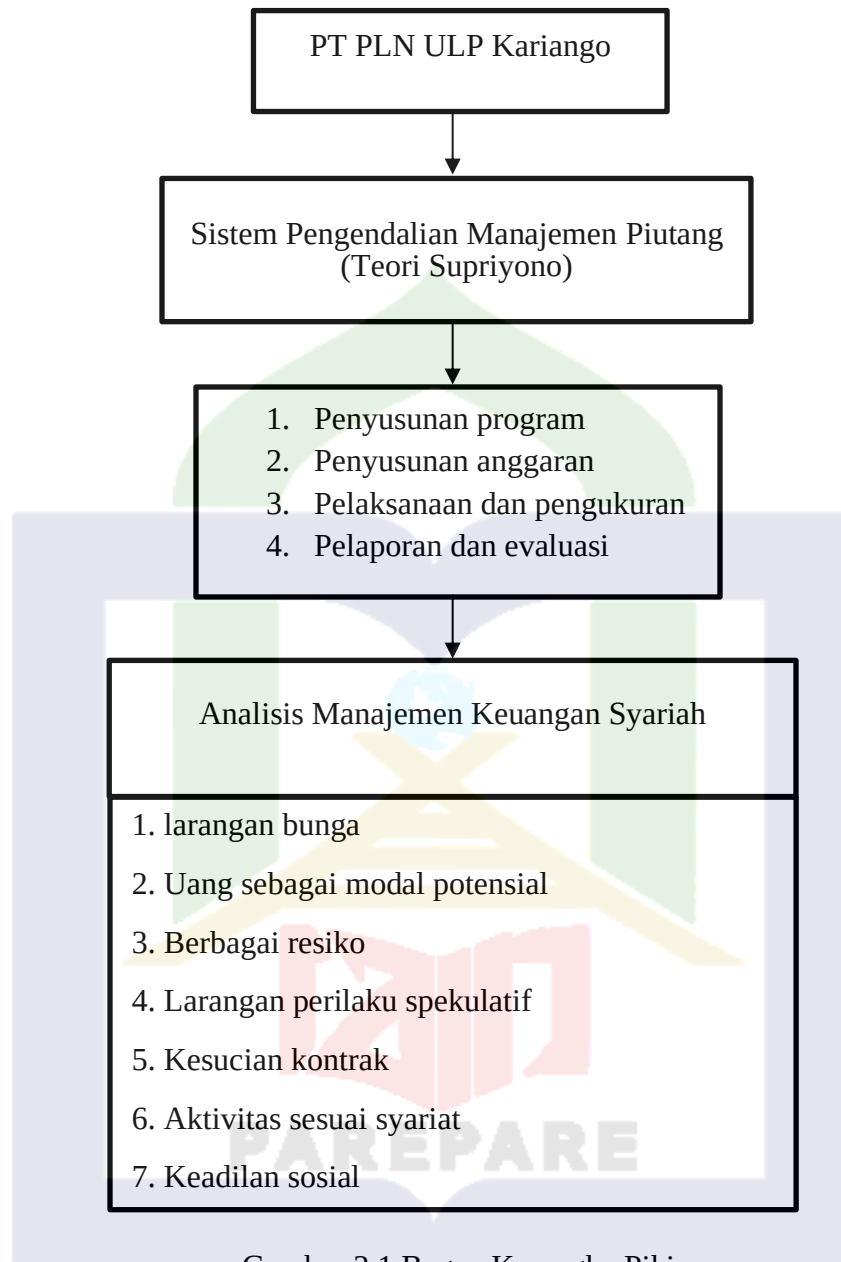
⁵³ Najmudin, “Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern”, (Yogyakarta: Andi, 2011), h.39.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di mulai dari sistem pengendalian manajemen piutang yang mana membahas masalah mengenai antara lain; penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran dan evaluasi yang dalam kaitannya dengan piutang. Selanjutnya penelitian akan di analisis berdasarkan anailisi manajemen keuangan syariah Dalam mencapai hasil tujuan dari sistem pengendalian manajemen piutang tersebut. Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

⁵⁴ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),h.26.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.⁵⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menginterpretasikan hasil dari penerapan sistem informasi manajemen khususnya penjualan kredit menurut pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti tanpa melakukan suatu pengujian metode statistik.

Pendekatan penelitian adalah studi kasus dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian masalah yang terdapat di PLN ULP Kariango terhadap besarnya penunggakan piutang dari dua tahun belakangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi pengendalian internal (manajemen) atas piutang usaha yang sekarang dilakukan oleh PT PLN ULP Kariango sebagai suatu fenomena kontemporer yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia pelaksananya.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebab proses penelitian memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti, serta data yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan kata-kata (wawancara) atau gambar dibandingkan angka-angka. Metode ini memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi di lapangan secara

⁵⁵ Saepuddin, et al., eds., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi), h.30.

menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang terjadi dan sedang diteliti melalui paradigma peneliti untuk menafsirkan obyek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁵⁶

Demikian peran peneliti sangat penting dalam menafsirkan dan mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini yaitu pegawai atau staf-staf yang bekerja di PT PLN ULP Kariango.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung dilokasi penelitin untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Lokasi penelitian

Penelitian dan perolehan data dilakukan pada PT PLN ULP Kariango, dimana perusahaan BUMN ini bergerak dalam bidang penjualan listrik yang berlokasi dikariango, jalan poros pinrang-pare.

2. Waktu penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan

⁵⁶ Aji Damanuri, "Metodologi Penelitian Muamalah" ,(Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

⁵⁷ Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7 (Jakarta: BumiAksara, 2004), h.26.

dilaksanakan kurang lebih satu bulan. Dengan mempertimbangkan jarak kampus dan lokasi penelitian cukup jauh. Sehingga data-data dapat terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini bagaimana mengetahui sistem pengendalian manajemen piutang pada PT PLN ULP Kariango.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data adalah semua keterangan yang bersumber dari data diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁸

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara

⁵⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. (Jakarta, Rineka Cipta:2006), h. 87.

langsung seperti hasil wawancara.⁵⁹ Adapun pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu manajer atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua.⁶⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang diambil dari kantor PLN Kariango.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa dokumen yang berkaitan dengan Sistem pengendalian manajemen piutang di PLN ULP Kariango. Serta hasil penelitian yang terdahulu berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal skripsi ini yakni antara lain: Teknik *field research* dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ Eko Putro Widoyoko, “*Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*”, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2016),h.49.

⁶⁰ Eko Putro Widoyoko, “*Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*”, (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2016),h.52.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan kontak langsung dengan tatap muka maupun dengan cara via online antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Jenis wawancara digunakan tidak terstruktur (*non-directif*).

Wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang ditemukan sebelumnya, kecuali pada tahapan sangat awal, yakni Ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum dalam area studi. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁶¹ Tujuan dari wawancara ini jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶² Adapun instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara.

Penelitian ini wawancara yang akan dilakukan pada kali ini di PT PLN ULP Kariango dengan SPV Pegawai dan staf-staf atau karyawan yang terlibat sebagai narasumbernya mengenai sistem pengendalian manajemen piutang kemudian wawancara juga ini dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai ekonomi dan manajemen syariah untuk menunjang dan membantu proses penyelesaian skripsi peneliti nantinya.

2. Observasi

⁶¹ Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007), h. 264

⁶² Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray), h.38

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁶³ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses. Observasi di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan.

Observasi non partisipan adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyakit terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian. Dalam observasi jenis ini peneliti melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti.⁶⁴

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung atau melalui pengambilan online di PT PLN ULP Kariango di jalan poros pare-pinrang kabupaten pinrang sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen piutang terhadap pengelolaan manajemen keuangan syariah.

3. Studi Dokumen dan dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada

⁶³ Sanafiah Faizal. *Format-format Penelitian Sosial*, Cet V. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.71

⁶⁴ Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", (Makassar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray), h.29

ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.⁶⁵

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengundang keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu, pengambilan gambar terkait sistem pengendalian manajemen piutang terhadap manajemen keuangan syariah pada PT PLN ULP Kariango. Tujuan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tulisan tentang sistem pengendalian manajemen, pengelolaan piutang dengan analisis manajemen keuangan syariah.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi.

⁶⁵ V. wiratna Sujarweni, “Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi”, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015),h.89.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini, metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh dari sumber yang berbeda.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶⁷ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.330

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabeta, 2007),h.80.

berbeda dalam hal ini pegawai atau staf-staf yang bekerja di kantor PLN ULP Kariango.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:⁶⁸

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang belum diolah oleh peneliti. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.⁶⁹

Setelah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti.

⁶⁸ V.wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi", (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2015), h.79.

⁶⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, (Prenada Media, 2016), h.406

Proses reduksi data yang dilakukan oleh peneliti lapangan pada saat melakukan kegiatan wawancara tidak terstruktur kepada informan. Hasil yang diperoleh kemudian dipilih, disatukan, lalu dipisahkan atau membuang informan yang dianggap tidak berkaitan dengan penelitian ini. Hal dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting sehingga akan dibuang data yang tidak diperlukan dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti yakni sistem pengendalian manajemen piutang pada PT PLN ULP Kariango terhadap manajemen keuangan syariah.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian penelitian memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data tersaji bermakna.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data

berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-nukti inilah yang disebut verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti Kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰ Verifikasi data dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya lalu menarik kesimpulan.

4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan yang telah diverifikasi. Setelah pengumpulan berbagai data dari informan. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

⁷⁰ Salim dan Hadir, *Penelitian Pendidikan, Metode, Pendekatan dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.117

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT PLN ULP Kariango adalah Unit Layanan Pelanggan yang Sub-unit di bawah UP3 pinrang yang membantu pengurusan pelayanan pelanggan administrasi dan Pelayanan jaringan listrik distribusi lebih dekat dengan ruang lingkup wilayah lebih kecil. PLN sebuah badan usaha milik negara mengurus semua aspek kelistrikan yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan. Adapun visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi : Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

Misi : Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.

Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

A. Penyusunan program di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah

Peneliti menjadikan teori Supriyono sebagai acuan dalam penelitian ini. Dikemukakan bahwa sebagai suatu sistem, sistem pengendalian manajemen meliputi lingkungan pengendalian manajemen dan proses pengendalian manajemen.

Penyusunan program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan dan mengenai proses pembuatan keputusan program baru untuk mencapai tujuan perusahaan seperti yang telah ditetapkan di PT PLN ULP Kariango. Dalam wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango bahwa:

“Adapun untuk program yang telah ditetapkan atau berjalan, PLN Peduli contohnya pembayaran listrik gratis untuk pelanggan yang tidak mampu, untuk sumber dana itu sendiri dari UPT 3 Pinrang dengan persen gaji dari pegawai itu sendiri, untuk program baru itu ada yang namanya program stimulus selama covid itupun ada 2 macam bantuan pemerintah melalui PLN, ada pelanggan pascabayar dan prabayar, nah stimulus untuk prabayar itu dalam bentuk token atau pulsa jadi pada saat pembelian pulsa ada diskon sebesar 50 persen dan untuk meteran pascabayar yaitu yang dibayar rekening setiap bulan contohnya itu pembayaran rekeningnya dikurangi”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat pemograman atau program strategis yang terdapat di PT PLN ULP Kariango, dengan penelaahan program yang sedang berjalan dapat dipusatkan pada satu jenis produk tertentu dan untuk mengatasi ketidakpastian masa depan atau kita dapat melihat bahwa di Negeri kita ini wabah Covid-19 tidak berhenti. Maka manajemen harus selalu siap untuk mengusulkan program-program baru. Adapun Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran seperti wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai SPV pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango bahwa:

Apakah dalam menyusun program tujuannya sudah jelas?

“Penyusunan program sendiri, PT PLN ULP Kariango setiap programnya dari pusat, kita mengikut saja apa yang diperintahkan oleh pusat dan programnya sudah jelas tujuannya untuk kebutuhan listrik pelanggan”⁷²

⁷¹ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

⁷² Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

Berapa tenggat waktu piutang setiap program?

“Tenggat waktu piutang untuk program pascabayar itu setiap 30 hari, begitupun untuk program electrifying agriculture. Program ini adalah mengalirkan listrik pertanian”⁷³

Apakah dalam pembagian kerja untuk program sudah mencapai tujuan?

“Pembagian kerja, itu ada yang catet meter, itu yang mencatat operasional pemakaian Kwh perbulan pelanggan. ada yang staff penjualan yang menagih piutang”⁷⁴

Bagaimana evaluasi setiap terhadap setiap program?

“Evaluasi setiap program, dilaporkan dalam bentuk penjualan perbulannya serta pemakaian pelanggan Kwh dibuatkan laporan penjualan setiap perbulan”⁷⁵

Menurut supriyono gagasan program baru dapat timbul dari eskutif puncak, staf perencanaan kantor pusat atau dari berbagai bagian organisasinya lainnya, misalnya saja pemerintah melalui kantor wilayah-wilayah dengan melihat potensi apa yang cocok sebagai program diwilayah tersebut.⁷⁶ Dalam wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango kembali menjelaskan bahwa:

“Yah dilihat dari potensi kantor PLN itu sendiri, kalau di Kariango kan potensinya penggilingan padi yah, beda dengan yang dienrekan sana potensinya bawang jadi program electrifying agriculture itu melistriki pertanian jadi bagaimana PLN membangun jaringan sampai usaha-usaha menikmati listrik dari PLN tidak menggunakan disel yang lebih mahal daripada listrik, jika pelanggan memanfaatkan otomatis bisa menekan biaya”⁷⁷

⁷³ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

⁷⁴ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

⁷⁵ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

⁷⁶ Supriyono, “Sistem Pengendalian Manajemen”, Edisi 1, buku 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000),h.62

⁷⁷ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dalam penyusunan program harus menelaah program yang telah ditetapkan dan membuat pengusulan program baru, agar keputusan mengenai program dapat ditafsirkan jumlah sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program dengan menekan biaya dan manfaat program tersebut. Berikut wawancara dari pelanggan pengguna program-program di PT PLN ULP Kariango, menjelaskan bahwa:

“Saya pelanggan PLN, program PLN yang saya gunakan pascabayar, jadi saya gunakan listrik dulu nanti akhir bulan baru saya membayar.”⁷⁸

Berdasarkan pelanggan diatas, peneliti simpulkan bahwa PT PLN ULP Kariango tidak membatasi program apa yang harus digunakan setiap pelanggan dan pelanggan diberikan kebebasan terhadap program apa yang ditelaah.

Hal serupa juga dirasakan oleh bapak Jamaluddin selaku pelanggan yang juga memilih program di PT PLN ULP Kariango, menjelaskan bahwa”

“Pekerjaan saya sebagai petani saya gunakan program dari PLN itu electrifying agriculture, karena kalau musim kemarau tidak ada air, jadi kita petani harus memompa air dulu dengan menggunakan listrik untuk mengaliri padi pembayarannya juga pada akhir bulan.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara dari beberapa pelanggan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa mengenai program dalam setiap penjualannya ke para pelanggan itu dengan cara kredit artinya pelanggan memanfaatkan sumber daya terlebih dahulu nanti di akhir bulan dilakukan pembayaran setiap program yang dipakai sehingga hal ini menimbulkan yang namanya volume penjualan.

⁷⁸ Hj.juhuria, pelanggan PLN ULP Kariango, wawancara di lakukan di desa lerang, 8 Juni 2022

⁷⁹ Jamaluddin, pelanggan PLN ULP Kariango, wawancara di lakukan di desa lerang, 8 Juni 2022

Menurut Mulyadi Volume penjualan merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual⁸⁰. Dalam menetapkan penjualan secara kredit PT PLN ULP Kariango menetapkan batas minimal kredit yang akan diberikan kepada pelanggan, semakin tinggi batas yang ditetapkan untuk masing-masing pelanggan berarti semakin besar pula dana yang di investasikan dalam piutang dan sebaliknya. Seperti wawancara dengan Adit karyawan di PT PLN ULP Kariango menjelaskan bahwa:

“Untuk volume penjualan kredit di PT PLN ULP Kariango ini dilakukan BP cicil. Sudah ada surat perjanjiannya antara kedua belah pihak PLN dan pelanggan untuk melunasi cicilannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pelanggan yang membayar lewat bulan harus sudah tertagih semua di bulan berjalan.”⁸¹

Berdasarkan dari pemaparan hasil wawancara diatas yang dijelaskan oleh Adit, dapat disimpulkan bahwa penjualan yang dilakukan secara kredit harus terlebih dahulu melakukan perjanjian kepada pelanggan agar tidak terjadi penghapusan piutang tak tertagih yang mengakibatkan cadangan kerugian piutang yang tak tertagih.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Yah untuk volume piutang kita di PLN mengusahakan tidak ada lagi pelanggan yang membayar lewat bulan karena salah satu target di PLN ini adalah zero tunggakan atau usahakan tidak ada pelanggan yang menunggak sehingga dilihat juga dari kesanggupan pelanggan itu sendiri, karena dalam penjualan kreditnya, kita ini menetapkan batas waktu yang segera dilunasi”⁸²

⁸⁰ Mulyadi, “Akuntansi Biaya”, Edisi 5 (Yogyakarta: Aditya Media, 2005), h.239

⁸¹ Adit, staf penjualan, wawancara di PT PLN ULP kariango, 3 Februari 2022

⁸² Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 4 februari 2022

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara oleh Fahmi arianti dapat disimpulkan bahwa volume piutang atau penjualan kredit, PLN harus menyusun sistem penjualan yang memungkinkan peningkatan volume penjualan dan memperoleh laba maksimal. Adapun wawancara dari pelanggan yang pernah mengalami penunggakan di PLN, menjelaskan sebagai berikut:

“Begini dek, saya menunggak karena saya dulu pakai pasca bayar yang mana memakai dulu baru akhir bulan ditagih, nah saya ini kadang lupa, nanti dapat tagihan baru jumlahnya banyak. Ini yang kadang membuat susah. Jadi saya sekarang beralih dari pascabayar ke parabayar karena token listrik kita yang isi semau kita sendiri.”⁸³

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti simpulkan bahwa PT PLN ULP Kariango dalam penjualan kredit juga melihat kualitas minimal standar kredit peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman serta kesanggupan dari pelanggan itu sendiri. Dengan itu PT PLN ULP Kariango bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Adapun data penjualannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penjualan Tahun 2021

No	Bulan	Total Penjualan Kwh
1	Januari	5.115.211.522
2	Februari	10.782.191.579
3	Maret	18.267.289.017
4	April	25.574.974.757

⁸³ Ramlah, pelanggan PLN ULP Kariango, wawancara di lakukan di desa lerang, 8 Juni

5	Mei	33.178.283.588
6	Juni	40.490.108.625
7	Juli	47.845.342.543
8	Agustus	55.403.788.550
9	September	63.191.579.571
10	Oktober	71.622.932.020
11	November	79.464.895.948
12	Desember	87.103.986.667

Sumber tabel: Hasil wawancara penjualan Adit staf di PT PLN ULP Kariango

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hasil kumulatif penjualan setiap bulannya di PT PLN ULP kariango, jika dilihat pendapatan reelnya penjualan bulan berjalan dikurangi dengan penjualan bulan sebelumnya atau penjualan kredit sehingga menghasilkan penjualan bersih yang menjadi target zero tunggakan di PT PLN ULP Kariango tersebut.

a. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyusunan program di PT PLN ULP Kariango

Kerangka dasar sistem keuangan Syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara Bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang

ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (lebih dikenal dengan sunnah). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan Syariah sebagai berikut: larangan bunga, uang sebagai modal potensial, berbagi resiko, larangan perilaku spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas sesuai syariat, dan keadilan sosial.⁸⁴

Penyusunan program, dilihat dari segi prinsip keadilan sosial, PLN ULP Kariango mengalokasikan seefisien mungkin agar program-program yang berjalan terealisasi kepelanggan dengan hal ini pihak PLN menyediakan kebutuhan untuk segala akses aktivitas keseharian pelanggan sesuai kebutuhan masing-masing pelanggan. Dan PLN membuat program pemberian listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu serta memberikan pilihan penjualan listrik dengan dua metode yakni pascabayar atau prabayar. PLN juga menyediakan program bagi petani yaitu program electrifying agriculture untuk mendorong petani memanfaatkan teknologi guna meningkatkan aktivitas produksi pertaniannya melalui energi listrik. Pelanggan yang memanfaatkan program ini menekan biaya produksi dan menambah biaya operasional PLN lebih baik. Segala kegiatan program tersebut untuk kemakmuran dan setiap pelanggan merasa adil. Hal itu selaras dari firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

⁸⁴ Dadan Husen Sobana, “Manajemen Keuangan Syariah”, Cet 1, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017),h.22.

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁵

Berdasarkan dalil yang disampaikan diatas dapat menjelaskan bahwa mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Karena sebenarnya pemilik hakiki dalam kehidupan ini adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif. Manusia adalah wakil Allah SWT dimuka bumi yang diberikan tugas untuk memimpin, mengatur dan memakmurkannya dengan adil sesuai dengan ketentuan Allah, semua dimuka bumi ini diciptakan untuk manusia. Dan Adapun kaya miskin adalah ketentuan dari Allah sebagai ujian untuk ketakwaan. Tidak diperbolehkan terjadi kezdoliman antar sesama manusia karena sumber daya yang diberikan adalah sebuah keadilan.

Penyusunan program di sistem pengendalian manajemen piutang lebih mengukur aktivitas pelanggan dengan PLN ULP Kariango seperti program-program yang berjalan maupun program baru yang antaranya yaitu, program stimulus, program PLN peduli dan program electrifying agriculture. Semua dana yang disediakan oleh PLN digunakan untuk menjalankan atau mengelola program-program tersebut demi memenuhi kebutuhan pelanggan.

B. Penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah

Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan bahwasanya, penyusunan anggaran memiliki peran penting dalam PT PLN ULP Kariango yaitu sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, QS Al-Maidah:8*(Jakarta Timur, 2015),h.32

Peyusunan anggaran adalah proses penetapan peran penting tiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program, penyusunan anggaran berhubungan dengan peran departemen anggaran yang bertugas mengadministrasikan aliran informasi sistem pengendalian melalui anggaran agar dapat dialokasikan, seperti wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango bahwa:

“Untuk penyusunan anggaran itu, kami hanya terima jadi karena kami bagian pelayanan pelanggan itu eksekusi saja, apa yang diperintahkan sama area kami di pinrang, nah area yang dipinrang itu yang mengatur dan mengalokasikan berapa anggaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan kariango ajukan misalnya kariango ajukan 10 pelanggan untuk program PLN peduli atau bantuan listrik gratis, perpelanggan itu misalnya saja untuk daya 50, biaya penyambungannya bersubsidi kurang lebih 250 rupiah dengan token ditambah dengan biaya pemasangan instalasi pelanggan kurang lebih 500 ribu pelanggan, kami ajukan nanti UP3 pinrang mintakan dananya kewilayah, wilayah itu dimakassar jadi ada rentetan, kami hanya eksekutor, untuk yang mengatur itu UPT 3 pinrang”⁸⁶

Penganggaran dalam PT PLN ULP Kariango disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen bawahnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, anggaran disusun untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan agar mengkoordinasikan kegiatannya. Dalam penelitian bahwasanya manajer setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dan memberikan alasan mengenai anggaran yang di usulkan. Setiap pusat pertanggungjawaban atau manajer bawah harus percaya bahwa anggaran yang di usulkan adalah wajar untuk dicapai. Agar manajer pusat pertanggungjawaban atau manajer puncak merasa adil tentang anggaran usulan.

⁸⁶ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango hanya terima bersih artinya pihak dari manajer karingo hanya mengusulkan berapa dana yang dibutuhkan untuk kepentingan pelanggan. Usulan anggaran menunjukkan bahwa prioritas usulan anggaran diprioritaskan kepada pelayanan pelanggan. Adapun rincian anggaran yang keluar berdasarkan biaya pelanggan setiap bulannya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Anggaran PLN ULP Kariango pada tahun 2021

Januari 4.493.040	Februari 4.107.008	Maret 5.163.240	TW-I 13.763.288
April 5.645.940	Mei 5.363.096	Juni 4.838.564	TW-II 15.846.600
Juli 4.895.544	Agustus 5.412.276	September 5.593.072	TW-III 15.900.892
Oktober 5.939.208	November 5.414.128	Desember 4.978.248	TW-IV 16.331.584

Tabel sumber : Fahmi Arianti, SPV Pelayanan dan Administrasi di PT PLN ULP Kariango

Berdasarkan dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan di PT PLN ULP Kariango untuk kepentingan pelanggan di hitung setiap pertiga bulan yang setiap perhitungan anggaran tersebut mengalami peningkatan dari total anggaran awal Rp 13.763.288 menjadi Rp 16.331.584 itu berarti

kebutuhan pelanggan akan pasokan yang disediakan di PT PLN ULP Kariango ini meningkat setiap perhitungan jika dilihat dari total anggaran tersebut. Untuk mengimplementasikan anggaran ini ke pelanggan, PT PLN ULP memberikan syarat pembayaran kredit dan melihat kebiasaan pembayaran pelanggan.

Syarat pembayaran kredit adalah suatu mekanisme ataupun perjanjian yang dijalankan antara pihak PLN dan pelanggan, untuk bisa melakukan kegiatan pelayanan kebutuhan pelanggan tersebut. Syarat pembayaran kredit ini dapat berupa ketat atau lunak, yang artinya semakin ketat syarat pembayaran kredit yang ditetapkan semakin cepat pengembalian piutang, sebaliknya juga semakin lunak syarat pembayaran kredit semakin lama pengembalian piutang dan jumlah piutang semakin besar, seperti wawancara oleh Adit staf di PT PLN ULP Kariango menjelaskan bahwa:

“kalau untuk syarat pembayaran kredit ini di PLN ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan yaitu yang mulanya pelanggan harus mengirimkan surat permohonan cicil pada pihak PLN setempat lalu surat tersebut akan diteruskan oleh PLN setempat ke kantor wilayah dan jika sudah di acc, maka sudah ada balasanya untuk pelanggan tersebut jika memang sudah bisa melakukan pembayaran secara kredit”⁸⁷

Adapun mengenai syarat pembayaran kreditnya di PT PLN ULP Kariango sebagai berikut:

1. Kunjungi kantor pelayanan PLN dengan membawa beberapa dokumen surat pelengkap permohonan kredit atau cicil seperti, fotokopi identitas diri KTP berlaku, serta surat kuasa bila diwakilkan

⁸⁷ Adit, staf penjualan, wawancara di PT PLN ULP kariango, 3 Februari 2022

2. Tunggu PLN melakukan survei apabila pihak PLN sudah menerima acc dari kantor wilayah, setelah proses permohonan pembayaran kredit diajukan, petugas PLN akan melakukan survei.
3. Pihak PLN akan memberikan surat perjanjian untuk di tanda tangani sebagai surat perjanjian jual beli tenaga listrik.

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara oleh Adit dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit, tidak semata-mata langsung diberikan tetapi melalui prosedur-prosedur yang harus dilalui pelanggan untuk mendapatkan pembayaran secara kredit. Dan untuk mengenai kebiasaan pembayaran pelanggan, Kebiasaan pembayaran pelanggan mengacu pada ada Sebagian pelanggan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount. Ada juga yang Sebagian tidak menggunakan tersebut. Kebiasaan para pelanggan yang membayar dalam periode cash discount tersebut sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Dengan Sebagian membayar selama discount periode, maka dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat cair dan akan memperkecil investasi dalam piutang. Seperti wawancara dengan Fahmi Arianti yang bertugas sebagai SPV administrasi dan pelayanan di PT PLN ULP Kariango, menjelaskan bahwa:

“Kalau yang mengenai kebiasaan pembayaran, PLN ada yang namanya alternatif pembayaran, yaitu memberikan jangka waktu selama 30 hari kepelanggan nanti di hari ke 30 atau akhir bulan bari dibayar, alternatif ini berarti mereka membelanjai sepenuhnya dengan kredit penjual. Dan cash discount itu disini namanya potongan pembayaran untuk program stimulus, ini program pemerintah, ada yang reguler (pascabayar) dan prabayar. Nah, kalau yang regular diskon sebesar 50%, kalau yang prabayar diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%”.⁸⁸

⁸⁸ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 4 februari 2022

Hal serupa juga dijelaskan oleh Adit staf di PLN ULP Kariango mengenai kebiasaan pembayaran pelanggan bahwa:

“Kebiasaan pelanggan dalam membayar listriknya. Biasanya macam-macam dalam membayar tagihan listriknya. Mereka itu ada yang membayar melalui ppob, kantor pos, indomaret ataupun alfamart dan lain sebagainya, dimana saja tempat bisa untuk melakukan pembayaran rekening listriknya”⁸⁹

Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa kebiasaan pelanggan dalam membayar dapat mempengaruhi piutang di PT PLN ULP Kariango karena banyak pelanggan yang membayar kredit dan mengambil kesempatan cash diskon, hal tersebut membuat pihak PLN untuk melihat kemampuan pengelolaan piutang berjalan dengan baik dan dapat ditagih menjadi kas.

a. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango

Dalam pandangan islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan, dapat ditegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran, pengendalian dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.⁹⁰ Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di PT PLN ULP Kariango, penyusunan anggaran terhadap analisis manajemen keuangan syariah dilihat dari segi prinsip aktivitas sesuai syariat dan larangan bunga.

1) Aktivitas sesuai syariat. Aktivitas sumber anggaran dalam PT PLN ULP Kariango untuk mendapatkan sumber anggaran, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal atau dari pusat kewilayah sudah sesuai dengan cara-cara syariah atau ketentuan-ketentuan ekonomi islam mengenai sumber anggaran dalam

⁸⁹ Adit, staf penjualan, wawancara di PT PLN ULP kariango, 3 Februari 2022

⁹⁰ Abdul Mannan, “Membangun Islam Kaffah”,(Jakarta:Madina Pustaka, 2000), h.152

melakukan aktivitasnya. Karena PT PLN ULP Kariango setiap program untuk menyalurkan anggaran melihat dari kebutuhan pelanggan. anggaran yang diperoleh dari UP3 pinrang disediakan untuk mengatur dan menyalurkan anggaran setiap perprogram.

Adapun penerapan nilai-nilai dasar ekonomi islam seperti siddiq dan Amanah dalam peyusunan anggaran dan menyalurkan anggaran tersebut kepada kebutuhan pelanggan. Seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu Bersama orang-orang yang jujur.⁹¹

Bahwasanya dalam penyusunan anggaran kejujuran adalah suatu kewajiban bagi PLN ULP Kariango dengan merincikan besarnya anggaran yang dibutuhkan dan mengimplementasikan anggaran pada kebutuhan perusahaan dan pelanggan. serta dalam penjualan dan piutang harus diiringi kejujuran. Bila jujur diterapkan, maka dalam menyalurkan anggaran dapat dipercaya atau Amanah. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Annisa ayat 58. Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

⁹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS AT-Taubah:119(Jakarta Timur, 2015),h.20

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu adil.⁹²

Berdasarkan dalam ayat tersebut diatas, dalam penyusunan anggaran PT PLN ULP Kariango menggunakan dana diamanahkan dari UPT 3 Pinrang untuk mengalokasikannya kepelanggan sesuai apa yang terjadi atau yang dibutuhkan dilapangan serta harus adil sesuai kesanggupan pengguna daya listrik perpelanggan.

2). Larangan bunga

PT PLN ULP Kariango dalam piutangnya tidak ada pemberian bunga setiap pembayaran kredit yang terlambat membayar melainkan memberikan sanksi atau peringatan kepada pelanggan. Fatwa MUI No. 31 tahun 2004, majelis ulama indonesia menganggap bahwa bunga adalah indentik dengan riba dan riba itu hukumnya haram dan dilarang. Penjelasan tersebut didukung dengan firman Allah subhana wa'ta'ala di QS.Ali-imran ayat 130. Sebagai berikut:

يَنْذِرُهَا أَيَّامًا آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَةً ۖ تَقَوُّوا لَعَلَّكُمْ تَخْلُصُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹³

Berdasarkan dalil yang di sampaikan diatas dapat menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang dalam melakukan interaksi dengan bunga disaat berutang

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS Annisah:58(Jakarta Timur, 2015),h.90

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS Ali-imran:130(Jakarta Timur, 2015),h.43

piutang. PT PLN ULP Kariango tidak memberikan bunga pada piutangnya tetapi melakukan prosedur-prosedur untuk melunasi utang.

C. Pelaksanaan dan pengukuran di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah

Pelaksanaan dan pengukuran diperlukan pengendalian operasional untuk mengkoordinasi atau mengarahkan kegiatan di bawah departemen administrasi dan pada tahap ini departemen administrasi melaksanakan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan dan penerimaan-penerimaan yang dihasilkan. Catatan dan biaya-biaya tersebut digolongkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan pusat-pusat tanggungjawabnya. Penggolongan yang sesuai program dipakai sebagai dasar untuk pemrograman di masa yang akan datang, sedangkan penggolongan yang sesuai dengan pusat tanggung jawab digunakan untuk mengukur kinerja. Seperti wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango bahwa:

“kalau yang mengenai pengukuran itu memang keputusan dari pengoperasian, tapi pengoperasian koordinasi dengan departemen administrasi untuk program yang akan dijalankan, nanti administrasi yang mengukur biayanya, dan pengoperasian harus mengetahui jumlah biaya yang diharapkan, agar administrasi dapat melaporkan ke manajer puncak nantinya”⁹⁴

Berdasarkan dari wawancara tersebut, peneliti dapat melihat dalam pelaksanaan dan pengukuran suatu kegiatan perlu adanya bantuan pengendalian operasional diluar dari anggaran, pengadmintrasian yang mengatur dan mengukur laporan anggaran perbandingan antara pendapatan biaya yang sesungguhnya dengan jumlah yang dianggarkan.

⁹⁴ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

Pengendalian operasional juga merupakan bagian dari pengendalian manajemen yang dalam aktivitasnya menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mengaplikasikan atau menyalurkan produksi kepada pelanggan. Seperti wawancara dengan Masyitah selaku karyawan yang bertugas sebagai operasional catet meter di PT PLN ULP Kariango bahwa:

“Iya, bisa dikatakan catat meter ini seperti pengendalian operasional karena catat meter itu mencatat berapa kebutuhan pelanggan atau berapa kwh yang dipake pelanggan setiap bulannya. Pencatatan meter dilakukan oleh petugas meter dengan menggunakan aplikasi mobile yang dinamakan ACMT. ACMT adalah aplikasi catat meter terpusat”⁹⁵

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara oleh operasional catat meter bahwasanya di PT PLN ULP Kariango dalam pelaksanaan dan pengukuran melihat dari kebutuhan pelanggan dan berapa banyaknya jumlah kebutuhan yang digunakan dalam satu bulan pemakaian, agar sumber-sumber produksi atau kwh dapat disalurkan sesuai dengan kapasitas dari pelanggan itu sendiri. Hal ini dijelaskan serupa dengan bapak Sumardi selaku billman di PT PLN ULP Kariango, menjelaskan bahwa:

“Sebelum melakukan pemasangan, kita pihak PLN sudah ada aturan sebelumnya, jika pembayaran lewat 1 bulan maka dilakukan pemutusan aliran listrik dan denda pembayaran sesuai daya, sementara jika lewat 2 bulan maka pemutusan MCB dan jika lewat 3 bulan maka dilakukan pemutusan Kwh. Dari itu sebelum melakukan pemasangan dilihat juga kapasitas kesanggupan pelanggan.”⁹⁶

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Muh.Ridwan Alwi selaku pelayanan teknik di PLN ULP Kariango, menjelaskan bahwa:

⁹⁵ Masyitah, Operasional catet meter, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

⁹⁶ Sumardi, Billman, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 08 Juni 2022

“Pemasangan khw kepelanggan banyak yang menggunakan golongan rendah dan jika pelanggan yang tidak sanggup melakukan pembayaran, biasanya memilih mengubah ke pemasangan token, hal ini memungkinkan kurangnya pengungkakan.”⁹⁷

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti dapat simpulkan sebelum melakuakn pemasangan harus melihat dari kesanggupan pelanggan itu sendiri, berapa daya yang disanggupi agar tidak terjadi pengunngakan dan mengakibatkan pemutusan khw. Adapun data kwh pelanggan setiap bulannya sebagai berikut:

Tabel 4.3 data Kwh pelanggan setiap bulan di PT PLN ULP Kariango

TARIF	DAYA	STAN METER	PEMKWH	JAM NYALA
R1	900	9360	100	111
R1	450	2468	38	84
R1M	900	17065	47	52
R1M	900	12644	82	91
R1	900	14617	77	86
R1	450	3482	48	107
R1	450	14431	98	218
R1	450	522	144	320
R1	450	11411	130	289
R1	1300	16969	81	62

Sumber tabel : Masyita, Operasional catet meter di PT PL ULP Kariango

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa PT PLN ULP Kariango dalam pengendalian operasionalnya menekankan pada jumlah tarif golongan R1 atau disebut juga sebagai tegangan rendah, dilihat dari beberapa data pelanggan diatas lebih banyak yang menggunakan golongan R1 dibandingkan golongan R1M, karena golongan R1 ini termasuk yang bersubsidi, sedangkan golongan R1M tidak bersubsidi. Sehingga dapat dikatakan PT PLN ULP kariango dalam pengendalian

⁹⁷ Muh.Ridwan Alwi, teknik pelayanan, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 08 Juni 2022

operasionalnya baik karena melihat kebutuhan dan kapasitas dari pelanggan tersebut. Dalam pemberian Kwh kepada kebutuhan pelanggan tidak semenah tapi PT PLN ULP juga memberikan batasan kepada pelanggan agar perputaran piutang lancar.

Pada pihak PLN ULP Kariango, berdasarkan hasil pengamatan lapangan oleh peneliti bahwasanya pembatasan pembeli yang dimaksud adalah pembatasan mengenai pembelian kredit, dengan batas jumlah yang telah diberikan pihak PLN. pembatasan ini bisa mempengaruhi besar kecilnya piutang. Semakin tinggi Batasan semakin besar piutang yang tertanam dan semakin kecil pemberian kredit semakin kecil piutang yang tertanam. Dalam batasan pembelian token PLN berlaku sesuai dengan golongan daya meteran yang digunakan dan limit penggunaan yang disediakan setiap bulannya. Seperti wawancara dengan Adit staf PLN ULP Kariango menjelaskan bahwasanya:

“Hm, kalau untuk pembatasan pembeli, kita ini melakukan pembatasan di pembelian token listriknya, dalam perbulannya pelanggan tidak boleh melebihi dari 720 jam nyalah yang artinya pemakaian Kwh yang melebihi batasnya, maka tidak boleh lagi membeli token pada bulan tersebut dan harus menunggu pada bulan berikutnya untuk pembelian selanjutnya, seperti itu”

Berdasarkan dari wawancara diatas oleh Adit, peneliti dapat simpulkan bahwa pembatasan pembeli diberikan minimal jangka waktu penggunaan setiap bulannya bahwasanya untuk menghindari adanya penunggakan dan akan menjadi piutang tak tertagih dibulan tersebut sehingga diberikan batasan yang tidak boleh melebihi jangka waktu itu supaya menjadi piutang lancar.

Adit selaku staf di PT PLN ULP Kariango Kembali menjelaskan bahwa:

“pihak PLN ada yang namanya limit kwh artinya batas maksimal dan kita ini ada berbagai golongan daya seperti daya 450,900,1.300,dan 2.200, yang perhitunganya, dapat dihitung batas penggunaan maksimum kwh setiap bulannya, $720 \times \text{golongan daya} \times \text{kwh} \times \text{Harga maksimum}$. Dan semua PLN perhitunganya seperti itu karena kita mengacu pada pusat.”⁹⁸

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Golongan meteran pelanggan dengan berbagai daya. Seperti, daya 450, daya 900, daya 1.300, dan daya 2.200, cara perhitungannya sebagai berikut: untuk daya 450, Batas maksimum kwh= $720 \text{ jam} \times 450 = 324 \text{ kwh}$ harga maksimum pembelian= $324 \text{ kwh} \times \text{Rp } 415 = \text{Rp } 134.460$. Untuk daya 900, Batas maksimum kwh= $720 \text{ jam} \times 900 = 648 \text{ kwh}$ harga maksimum pembelian= $648 \text{ kwh} \times \text{Rp } 1.352 = \text{Rp } 876.096$. Untuk daya 1.300, Batas maksimum kwh= $720 \text{ jam} \times 1.300 = 936 \text{ kwh}$ harga maksimum pembelian= $936 \text{ kwh} \times \text{Rp } 1.444.70 = \text{Rp } 1.352.239$. Dan untuk daya 2.200, Batas maksimum kwh= $720 \times 2.200 = 1.584 \text{ kwh}$ harga maksimum pembelian = $1.584 \text{ kwh} \times \text{Rp } 1.444.70 = \text{Rp } 2.288.404$. itu berarti jika semakin tinggi pemakaian akan kwh semakin tinggi pula beban piutang yang akan ditanggung PLN sehingga memang perlu adanya pembatasan agar menghindari terjadinya penunggakan.

a. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap pelaksanaan dan pengukuran di PT PLN ULP Kariango

Prinsip manajemen keuangan syariah yang terdapat dalam pelaksanaan dan pengukuran yaitu berbagi resiko. Karena dalam pengoperasian tidak adanya bunga terhadap pembelian secara kredit dari itu sumber-sumber biaya diukur biaya anggaran investor dan bukan kreditor. Penyediaan biaya dari pusat setiap jumlah pengukuran biaya direalisasikan perprogram. Sehingga resiko dengan imbalan pembagian keuntungan, hal ini dikuatkan dalam fiqih islam.

⁹⁸ Adit, staf penjualan, wawancara di PT PLN ULP kariango, 3 Februari 2022

Fiqih islam, mereka yang melakukan perjalanan niaga (dharb) mencari Sebagian karunia Allah adalah para pengusaha yang bertindak sebagai mudharib yang terikat dalam perjanjian mudharabah dengan sistem bagi hasil. Dalam pengertian fiqih islam juga disebutkan bahwa syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha Bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan atau kerugian dibagikan menurut perbandingan banyaknya modal.⁹⁹ Hal itu selaras dari firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 120. Sebagai berikut:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan dia mahakuasa atas segala sesuatu.¹⁰⁰

Berdasarkan dalil yang disampaikan diatas dapat menjelaskan bahwa sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian bukan suatu kemungkinan, manusia itu akan selalu menginginkan suatu kestabilan bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan stabil, yaitu Allah SWT semua kepemilikannya. Hanya Allah yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam berbagi resiko, mengatur segala hal terkait resiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.

D. Pelaporan dan analisis di PT PLN ULP Kariango terhadap analisis manajemen keuangan syariah

Laporan memuat informasi apa yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan anggarannya atau programnya. Pelaporan adalah proses untuk menyusun

⁹⁹ Rozalinda, "Fiqih Islam", Cet 1 (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h.207

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, QS Al-Maidah:120*(Jakarta Timur, 2015),h.127

dan menyajikan laporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan disusun setiap pusat pertanggungjawaban. Pada PT PLN ULP Kariango, pelaporan dan analisisnya berdasarkan setiap program yang terdapat disana, seperti wawancara dengan Fahmi Arianti selaku pegawai yang bertugas sebagai pelayanan dan administrasi di PT PLN ULP Kariango bahwa:

“Kalau Analisa laporannya itu berdasarkan perprogram seperti program PLN peduli dilaporkan eviden kalau sudah terpasang listrik gratisnya dilapangan kemudian jumlah pelanggan dan rincian anggarannya, kalau untuk program stimulus itu pelaporan dan analisisnya kita hanya monitoring penyaluran karena yang memberikan itu pemerintah melalui PLN dengan pemakaian aplikasi apakah betul sudah sampai stimulusnya kepelanggan. Dan untuk program electrifying agriculture, pelaporan dan analisisnya dilihat dari berapa aliran listrik ke pengguna penggilingan padi nanti ini yang akan menjadi pelanggan”¹⁰¹

Berdasarkan dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal Pelaporan dan analisis di PT PLN ULP Kariango, laporan digunakan sebagai bagian dari pengendalian, beberapa diantaranya turunan dari analisis yang mengembangkan program dan membandingkan kinerja yang direncanakan disertai dengan penjelasan. Adapun pelaporan dan analisis yang dilihat dari sudut programnya antara lain; program PLN peduli, program stimulus dan program electrifying agriculture.

Dalam pemberian pembayaran kredit di PT PLN ULP Kariango menerapkan suatu kebijakan pada saat penagihan karena jika pelanggan membayar secara kredit maka akan menghasilkan piutang yang dalam praktiknya sering sekali terjadi piutang yang macet atau tidak tertagih yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan risiko sehingga dari itu PT PLN ULP Kariango memperketat dalam sistem

¹⁰¹ Fahmi Arianti, pelayanan dan administrasi, wawancara di PT PLN ULP Kariango, 26 Januari 2022

kebijakan penagihan seperti wawancara dengan Adit staf PT PLN ULP Karingo menjelaskan bahwa:

“untuk penagihan sendiri, ketika rekening listrik sudah terbit di awal bulan, biasanya pada setiap tanggal 2 awal bulannya itu, langsung dilakukan penagihan team biller kepada pelanggan-pelanggan pascabayar, penagihan ini harus segera mungkin dilakukan agar tidak ada pelanggan yang telat membayar listriknya dan terkena sanksi. Nah, biasanya ini sanksinya berupa penyegehan terhadap Kwh meternya dirumah itu”¹⁰²

Pejualan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akan mengandung resiko yang tidak dapat di hindari. Dengan hal itu resiko dapat dikendalikan agar berada dalam batas wajar, karena resiko yang timbul dari penjualan secara kredit dapat dikatakan sebagai kerugian piutang, maka dari itu pihak PLN memberikan ketegasan terhadap penagihan. Adapun hasil wawancara dengan pelanggan yang telat membayar listrik, menjelaskan bahwa:

“saya pelanggan pasca bayar, pernah saya lupa bayar listrik kurang dari 30 hari denda 3.000 karena saya daya 450va”¹⁰³

Berdasarkan penjelasan dari pelanggan diatas, peneliti dapat simpulkan bahwa pelanggan yang telat membayar listrik kurang dari 30 hari diberikan sanksi atau denda.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Supriati selaku pelanggan pasca bayar, menjelaskan bahwa:

“Ya, untuk penggunaan listrik pascabayar itu memang tidak dirasa kalau sudah waktunya bayar listrik, jadi kadang saya lupa, pernah telat 2 hari dari jangka waktunya telah ditetapkan, itu saya denda waktu itu 5000 karena saya golongan daya tinggi 900va.”¹⁰⁴

¹⁰² Adit, staf penjualan, wawancara di PT PLN ULP kariango, 3 Februari 2022

¹⁰³ Aminah, pelanggan PLN ULP Kariango, wawancara di lakukan di desa lerang, 09 Juni 2022

¹⁰⁴ Supriati, pelanggan PLN ULP Kariango, wawancara di lakukan di desa lerang, 09 Juni 2022

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pelanggan diatas peneliti disimpulkan bahwa sanksi atau denda listrik pembayaran dendanya dibagi sesuai golongan. Hal ini dapat dilihat bahwa PT PLN ULP Kariango dalam melaksanakan kebijakan penagihan kredit maupun nonkredit telah melakukan cara atau teknik dengan baik, dengan membagi golongan dengan ringan agar supaya menghindari terjadinya resiko tunggakan piutang yang terjadi tersebut.

a. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap pelaporan dan evaluasi di PT PLN ULP Kariango.

Menyusun dan menyajikan laporan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip manajemen keuangan syariah yang terdapat didalamnya adalah kesucian kontrak. Hal ini PT PLN ULP Kariango memberikan pelaporan kepada manajer puncak disusun secara rinci, hal ini memberikan pelaporan dengan jujur sesuai apa yang terjadi dilapangan. Menurut Dadan Husen Sobana kesucian kontrak, islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci menilai sesuatu yang tinggi nilainya sehingga kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Penjelasan tersebut didukung dengan firman Allah subhana wa'ta'ala di QS. An-nahl ayat 105. Sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.¹⁰⁵

Berdasarkan dalil penjelasan tersebut. Orang Islam yang berdusta atau melakukan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt. Hal ini sesuai di PT PLN ULP Kariango pelaporan dilakukan dengan jujur untuk berapa dana anggaran yang diajukan ke upt3 pinrang. Dan dialokasikan ke pelanggan

sesuai kebutuhan, pelaporan dan analisis dirincikan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya kebohongan serta jujur dalam pelaporannya ke upt 3 pinrang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengendalian manajemen piutang pada PT PLN ULP Kariango. Menjalankan empat proses pengendalian manajemen terhadap analisis manajemen keuangan syariah, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan program, di PT PLN ULP Kariango terdapat 3 program antara lain, program PLN Peduli, program stimulus dan program electrifying agriculture. Mengenai program untuk setiap penjualannya dilakukan secara kredit atau piutang dan berjalan baik. Hal itu dikarenakan program yang stimulus pascabayar beralih keprabayar untuk menghindari terjadinya penunggakan piutang. Analisis manajemen keuangan syariah terhadap penyusunan anggaran terdapat prinsip keadilan.
2. Penyusunan anggaran teralokasikan dengan baik, usulan anggaran menunjukkan bahwa PT PLN ULP Kariango yang berada dibawah naungan UPT3 Pinrang, mengalokasikan sumber dana anggaran untuk prioritas pelanggan setiap bulan penjualan Kwh. Prinsip manajemen keuangan syariah yang terdapat di penyusunan anggaran yaitu aktivitas sesuai syariah dan larangan bunga.
3. Pelaksanaan dan pengukuran, di PT PLN ULP kariango sudah dan telah memadai, hal ini dilihat dari operasional catet meter dan billman, dengan mengukur kesanggupan pelanggan untuk pemasangan daya Kwh. Analisis

manajemen keuangan syariah yang terdapat di pelaksana dan pengukuran adalah prinsip berbagi resiko.

4. Pelaporan dan analisis yang disusun secara rinci dengan analisis yang mengembangkan program telah berjalan dengan membandingkan kinerja dilapangan disertai dengan penjelasan yang benar. Prinsip manajemen keuangan syariah yang terdapat didalamnya yaitu kesucian kontrak.

B. Saran

Berikut ini adalah sebagai saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Dalam pengendalian manajemen PT PLN ULP Kariango harus tetap mempertahankan keempat proses pengendalian manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terlaksanakan dengan sebaik- baiknya.
2. PT PLN ULP Kariango harus mampu mempertahankan dan tetap menjalankan sistem pengendalian piutangnya dengan baik agar target instansi mampu di capai secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Boedi. Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017.

Amin. Manajemen Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka cipta, 1993.

Ashari, Darsono dan . Manajemen Keuangan. Yogyakarta:BPFE,2004.

Aziz, Abdul . Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. (Jurnal Bisnis; Vol.4, (1), 2016.

Badriwa, Zaki. Intermedite Accounting. Yogyakarta:BPFE.2000.

Charles. Pengantar Akuntansi Manajemen. Jakarta: Erlangga, 2014.

Christine Daymon dan Immy Holloway, Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications , Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.

Damanuri Aji, “Metodologi Penelitian Muamalah” , Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Duari, Iputu Hardani Hesti Duari. Sistem Informasi Manajemen Pemanduan Wisata. Yogyakarta;Depublish, 2017.

Faizal Sanafiah, Format-format Penelitian Sosial ,Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Habibie, Nabila. Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Adira Finance Cabang Manado. (Jurnal Emba; Vol.1, (3), 2013.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. Manajemen Syariah dalm Praktik. Jakarta; Gema Insani Press, 2003.

Hanafi, M, Mamduh. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: YKPN, 1998.

Hayai, Anggraeny Retno Hayai. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar, (Skripsi Sarjana; Ekonomi; Makassar), 2012.

Hery. Pengendalian Akuntansi dan Manajemen. Jakarta: Kencana, 2014.

Horngran, Dkk. Akuntansi. Jakarta: Erlangga, 2006.

Imam, Nauvalil Maskatul Imam. Evaluasi Struktur Sistem Pengendalian Manajemen, Proses Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Manajerial, Pada Bank

- Jatim Cabang Jember dan Kantor Cabang Pembantu. (Skripsi Sarjana; Ekonomi; Jember), 2015.
- Kasmir. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Kurniawan, Vebi Puput Kurniawan. Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; Surabaya), 2013.
- Mannan Abdul. Membangun Islam Kaffah. Jakarta:Madina Pustaka, 2000.
- Manurung, Elvy Maria. Akuntansi Dasar (Untuk Pemua). Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet.7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Martono, Harjito. Manajemen Keuangan. Edisi 1. Yogyakarta: Ekonosi, 2013.
- Mistianah. Laporan Manajemen dan Keuangan. Edisi 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta; Ekonisia, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto dkk. Pengantar Manajemen Syariah. Jakarta; Khairul Bayan, 2002.
- Mulyadi, Akuntansi Biaya, Edisi 5. Jakarta: Aditya Media. 2005
- Mulyadi. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Murhaban Dan Adnan. Sistem Pengendalian Manajemen . Aceh: Sefa Bumi Persada ,2020.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Najmudin. Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern. Yogyakarta:Andi, 2011.
- Niswonger. Prinsip-prinsip Akuntansi. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Purnamasari, Imas. Hubungan Struktur Sistem Pengendalian Manajemen Dan Proses Sistem Pengendalian Manajemen Dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada

- PT. Kereta Api Indonesia (Persero). (Jurnal Fokus Ekonomi; Vol.4, (1), 2009.
- Putrayasa, I Made Agus dan Mode Dana Saputra. Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan. (Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan; Vol.14, (1), 2018.
- Putri, Amalia Puput. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Dalam Kaitannya Dengan Pengendalian Biaya Capital Expenditure (Studi kasus pada PT Pertamina Hulu Energi OFFshore North West Java), (Skripsi Sarjana; Ekonomi; Bandung), 2012.
- Rahayu, Eka Ayu Dan Joni Susilobowo. Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur. (Jurnal Ilmu Manajemen; Vol. 2, (4), 2014.
- Rarianto, Wirawan Ed. Strategi Dalam Konteks Pengendalian Manajemen. Surabaya: Universitas Ciputra, 2019.
- Riyanto, Bambang. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 4. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada. 2009.
- Rozalinda. Fiqih Islam. Cet 1. Jakarta: Rajawali pers. 2016.
- S, Munawir. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Saepuddin, et al., eds., "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", Makalah dan Skripsi; Edisi Revisi, 2020.
- Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan , dan Jenis, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 117.
- Setiawan, Iwan. Akuntansi Keuangan Menengah. Bandung: Refika Utama, 2010.
- Syamsuddin, Lukman. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Sodana. Manajemen Keuangan Teori dan Praktik. Surabaya: Airlangga University Press. 2009.
- Sobana, Dadan Husen. .Manajemen Keuangan Syariah. Cet 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Subagyo Joko, Metode Penelitian (dalam teori praktek), Jakarta, Rineka Cipta: 2006.

- Sugiri, Slamet. Akuntansi Pengantar 2. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan, 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Elfabeta, 2007.
- Sujarweni ,V.wiratna. Metodologi Penelitian Bisnis & EKonomi,Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Sukirno, Sadono. Pengantar Bisnis. Jakarta; Kencana, 2006.
- Supriyono. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi 1, buku 1. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Sutarman. Pengantar Teknologi Informasi. Edisi 1.Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. Sistem Informasi Manajemen. Ed1,Cet 1. Yogyakarta: Depublish, 2016.
- Widjajanto, S, Nugroho. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga, 2001
- Widoyoko, Eko Putro. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Wijaya Hengki, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2018.
- Yusuf A. Muri , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan , 2016.
- Yusuf, Hanafi, Al. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: YKPN, 1992.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SAFWA AL ZAFITRI
 NIM : 18.2900.010
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIUTANG
 PADA PT PLN ULP KARIANGO (ANALISIS
 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Narasumber

1. Bagaimana penyusunan program di PT PLN ULP Kariango?
2. Apakah dalam penyusunan program tujuannya sudah jelas?
3. Berapa tenggat waktu piutang setiap program?
4. Apakah dalam pembagian kerja sudah mencapai tujuan?
5. Bagaimana evaluasi setiap program?
6. Bagaimana penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango?
7. Bagaimana penyusunan anggaran dengan syarat pembayaran kredit?
8. Bagaimana penyusunan anggaran dengan kebiasaan pembayaran pelanggan?
9. Bagaimana pelaksanaan di PT PLN ULP Kariango?
10. Bagaimana pengukuran di PT PLN ULP Kariango?
11. Apakah pelaksanaan dengan pembatasan pembeli berjalan baik?
12. Bagaimana pelaporan di PT PLN ULP kariango?
13. Bagaimana pelaporan dan analisis dengan pembayaran kredit?
14. Apakah sistem pengendalian manajemen piutang di PT PLN ULP Kariango telah memenuhi syariat islam?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 7 Oktober 2021.

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP. 19760604 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP. 19720929 200801 1 012



DATA MENTAH

1. Bagaimana penyusunan program di PT PLN ULP Kariango?

Jawab: Penyusunan program di PT PLN ULP Kariango mengikuti program yang terlaksanakan dipusat, programnya di antara lain, program PLN Peduli, program stimulus dan program electrifying.

2. Apakah dalam penyusunan program tujuannya sudah jelas?

Jawab: Ya. Tujuannya untuk kebutuhan listrik pelanggan

3. Berapa tenggat waktu setiap program?

Jawab: Setiap 30 hari atau perbulan.

4. Apakah pembagian kerja sudah mencapai tujuan?

Jawab: Ya. Pembagian kerja. Ada yang catet meter pemakaian Kwh pelanggan perbulan dan staff penjualan yang menagih piutang.

5. Bagaimana evaluasi setiap program?

Jawab: Dilaporkan dalam bentuk laporan penjualan yang dibuatkan setiap per 30 hari atau 1 bulan.

6. Bagaimana penyusunan anggaran di PT PLN ULP Kariango?

Jawab: Anggaran disusun oleh UPT 3 Pinrang.

7. Bagaimana penyusunan anggaran dengan syarat pembayaran kredit?

Jawab: Anggaran yang dilakukan oleh PLN ULP Kariango hanya terima bersih dan mengusulkan dana ke UP3 Pinrang. Untuk mengimplentasikan anggaran ke pelanggan dilakukan dengan syarat pembayaran kredit.

8. Bagaimana penyusunan anggaran dengan kebiasaan pembayaran pelanggan?

Jawab: Anggaran di usulkan ke UP3 setiap perbulan.

9. Bagaimana pelaksanaan di PT PLN ULP Kariango?

Jawab: Pelaksanaan memerlukan pengendalian operasional.

10. Bagaimana pengukuran di PT PLN ULP Kariango?

Jawab: pengukuran suatu kegiatan perlu adanya bantuan pengendalian operasional diluar dari anggaran dengan mengukur pendapatan biaya dengan jumlah yang dianggarkan.

11. Apakah pelaksanaan dengan pembatasan pembeli berjalan dengan baik?

Jawab: Ya. Karena menekan biaya operasional.

12. Bagaimana pelaporan di PT PLN ULP Kariango?

Jawab: Pelaporan berdasarkan perprogram

13. Bagaimana pelaporan dan analisis dengan pembayaran kredit?

Jawab: Pelaporan setiap tanggal 2 awal bulan dengan analisis pembayaran kredit sudah harus tertagih.

14. Apakah sistem pengendalian manajemen piutang di PT PLN ULP Kariango telah memenuhi syariat Islam?

Jawab: Ya. Sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.153/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SAFWA AL ZAFITRI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 02 JULI 1999
NIM : 18.2900.010
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : ABBANUANG, DESA LERANG, KECAMATAN
LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIUTANG PADA PT PLN ULP KARIANGO
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Januari 2022
Dekan,



Muhammad Kamal Zubair

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0031/PENELITIAN/OPMPTSPH/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Mengingat :

- bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-01-2022 atas nama SAFWA AL ZAFIRAH yang mempunyai alamat rumah yang ditetapkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 18 Tahun 2019, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 28 Tahun 2019.

Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi dan Teknik PTSP : 0034/SP/TEKNIK/PMPTSPH/2022, Tanggal : 18-01-2022
2. Berita Acara Penomoran (BAP) Nomor : 0026/BA/PENELITIAN/OPMPTSPH/2022, Tanggal : 18-01-2022

KEPUTUSAN

Menetapkan :

KESATU

- Menentukan Rekomendasi Penelitian kepada :

 1. Nama Lengkap : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lengkap : JL. AMAL BAKTI No. 08 SOROFANG
 3. Nama Peneliti : SAFWA AL ZAFIRAH
 4. Judul Penelitian : SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIDTONG PADA PT. PLN ULP KANDANGO (KUALITAS MANAJEMEN KELOMPOK SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/Target Penelitian : KEPALA BIDANG SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIDTONG PADA PT PLN ULP KANDANGO
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mateneh Bata

KEDUA

- Menentukan dan menetapkan berlaku secara resmi dalam satu bulan sejak tanggal 18-01-2022.

KETIGA

- Peneliti agar melaksanakan penelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib menandatangani laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP setelah lamanya 6 bulan sejak penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2022

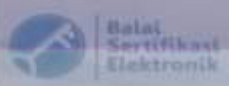


Birya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406011993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

PAREPARE




Diketahui dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang

OPMPTSPH

PT PLN ULP KARIANGO
KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jl. Poros Pinrang-parepare, Makkawaru, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0004/SDM.02.06/Manager/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHMI ARIANTI
Jabatan : SPV PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut Namanya di bawah ini :

Nama : SAFWA AL ZAFITRI
Nim : 18.2900.010
Tempat dan Tgl. Lahir : Parepare, 02 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Abbanuang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PT PLN ULP Kariango dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PIUTANG PADA PT PLN ULP KARIANGO
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

Lama penelitian 21 Januari 2022 s.d 21 Februari 2022

Dengan Surat Keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Februari 2022
a.n SPV PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
KANTOR PLN ULP KARIANGO


Fahmi Arianti

PT PLN ULP KARIANGO
KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN
 Jl. Poros Pinrang-parepare, Makkawaru, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
 Selatan 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 Nomor : 0004/SDM.02.06/Manager/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Spv Pelayanan dan Administrasi kantor PLN ULP Kariango menerangkan bahwa,

Nama	Safwa Al Zafitri
Universitas	Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan	Manajemen Keuangan Syariah
Judul Skripsi	Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT PLN ULP Kariango pada 21 Januari 2022 s.d 21 Februari 2022

Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Februari 2022
 a.n SPV PELAYANAN DAN ADMINISTRASI
 KANTOR PLN ULP KARIANGO


 Fahmi Arianti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fahmi Arianti
Tempat/Tanggal lahir	: Maros, 18 September 1990
Agama	: Islam
Pekerjaan	: SPV Pelayanan dan Administrasi PLN ULP
Kariango	

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 26 Januari 2022
Yang di Wawancarai

Fahmi Arianti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

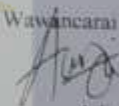
Nama	: Adit
Tempat/Tanggal lahir	: Palembang, 25 Januari 1998
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Staff PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 03 Januari 2022

Yang di Wawancarai


Adit

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Arianti
 Tempat/Tanggal lahir : Pinrang - 19 September 1998
 Agama : Islam
 Pekerjaan : SPV Pelayanan dan Administrasi PLN ULP
 Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 04 Februari 2022

Yang di Wawancarai


 Fahmi Arianti

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ridwan Alwi
Tempat/Tanggal lahir : JENEPONTO, 17 JANUARI 1973
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Pelayanan teknik PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 08 Juni 2022

Yang di Wawancarai

Muh. Ridwan alwi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

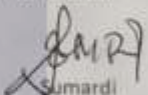
Nama : Sumardi
Tempat/Tanggal lahir : Albaruang 05-01-1973
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Billman PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 08 Juni 2022

Yang di Wawancarai


Sumardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ramlah
 Tempat/Tanggal lahir : 01-07-1987
 Agama Islam
 Pekerjaan PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 08 Juni 2022

Yang di Wawancarai


 Ramlah


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

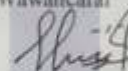
Nama : Hjjuhuria
Tempat/Tanggal lahir : AB BANGUNG 15-03-1980
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Pelanggan PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 08 Juni 2022

Yang di Wawancarai


Hj Juhuria

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

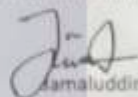
Nama : Jamaluddin
Tempat/Tanggal lahir : 04-12-1978
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Pelanggan PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 08 Juni 2022

Yang di Wawancarai


Jamaluddin

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminah

Tempat/Tanggal lahir : 31-12-1983

Agama : Islam

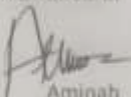
Pekerjaan : Pelanggan PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)".

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 09 Juni 2022

Yang di Wawancarai


Aminah

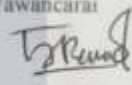
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

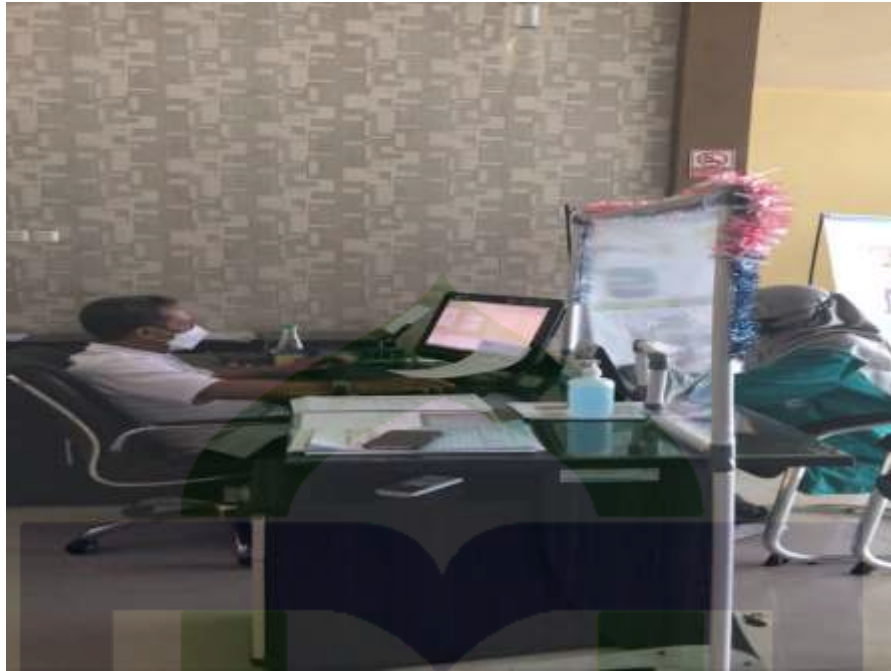
Nama	Supriati
Tempat/Tanggal lahir	Abanuang, 25-10-1979
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelanggan PLN ULP Kariango

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SAFWA AL ZAFITRI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Sistem Pengendalian Manajemen Piutang Pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) "

Dengan Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 09 Juni 2022
Yang di Wawancarai

Supriati

PAREPARE









BIODATA PENULIS



Safwa Al Zafitri, lahir di Kota Parepare, pada tanggal 2 Juli 1999. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Tera dan Ibu Nadra Mahruf. Kini penulis beralamat di Jampue Abbanuang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK 70 Lerang, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 70 Lerang kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Muara Wahau, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Pinrang. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Lanrisang, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di Kantor Desa Lerang, Kabupaten Pinrang. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Piutang pada PT PLN ULP Kariango (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).